

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP ETIKA POLITIK
KAMPANYE PARTAI ACEH
(STUDY KASUS KAMPANYE PARTAI ACEH PASCA
PEMILU LEGISLATIF 2019 DI GAYO LUES)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMITA

NIM. 150801012

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Jurusan Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP ETIKA POLITIK KAMPANYE
PARTAI ACEH**

(Study Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 Di Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

RAHMITA

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi: Ilmu Politik

NIM : 150801012

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

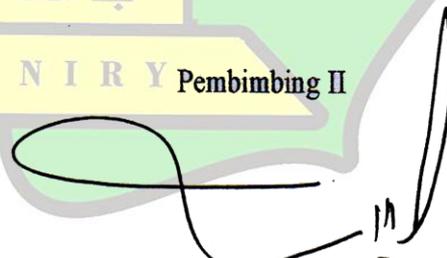
Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II



Dr. Muhammad, M.Ed.
NIP:196007211997031001



Ade Irma, B. H. Sc., M. A.
NIP: 197309212000032004

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP ETIKA POLITIK KAMPANYE
PARTAI ACEH**

(STUDI KASUS KAMPANYE PARTAI ACEH PASCA PEMILU
LEGISLATIF 2019 DI GAYO LUES)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Uin Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai

Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

4 Desember 2019

Rabu, Rabiul Akhir 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad, M.Ed.
NIP:196007211997031001

Ade Irma, B. H. Sc., M. A.
NIP: 197309212000032004

Penguji 1

Penguji 2

Dr. phil. Saiful Akmal, M.A
NIP:198203012008011006

Danil Akbar Taqwadin, BIAM., M.Sc
NIDN: 2008048903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh



Dr. Enita Usya, S. Ag. M. Hum
NIP: 1977072320032002

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul ***“Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh” (Studi Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 Di Gayo Lues)***. Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi demi memperoleh gelar sarjana ilmu politik pada Program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada pangkuan Rasulullah SAW. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, penulis persembahkan kepada yang terhormat :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M, Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. Muhammad, M.Ed, selaku Pembimbing I dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini kepada penulis.

3. Kepada ibu Ade Irma, B. H. Sc., M. A, selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu penulisan skripsi ini serta meluangkan waktu dan tenaga untuk penulis.
4. Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guna dijadikan data pada penelitian ini.
5. Terimakasih juga Pada Almarhum Ayahanda Ismail dan Ibunda Nursinah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materil yang tiada henti sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah memberikan balasan kebahagiaan dunia akhirat.
6. Terimakasih untuk teman-teman dan yang terutamanya berterimakasih kepada abangda Aulia Afrizal S 1 Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, yang senantiasa memberi semangat buat saya yang telah membantu dalam menulis skripsi ini.

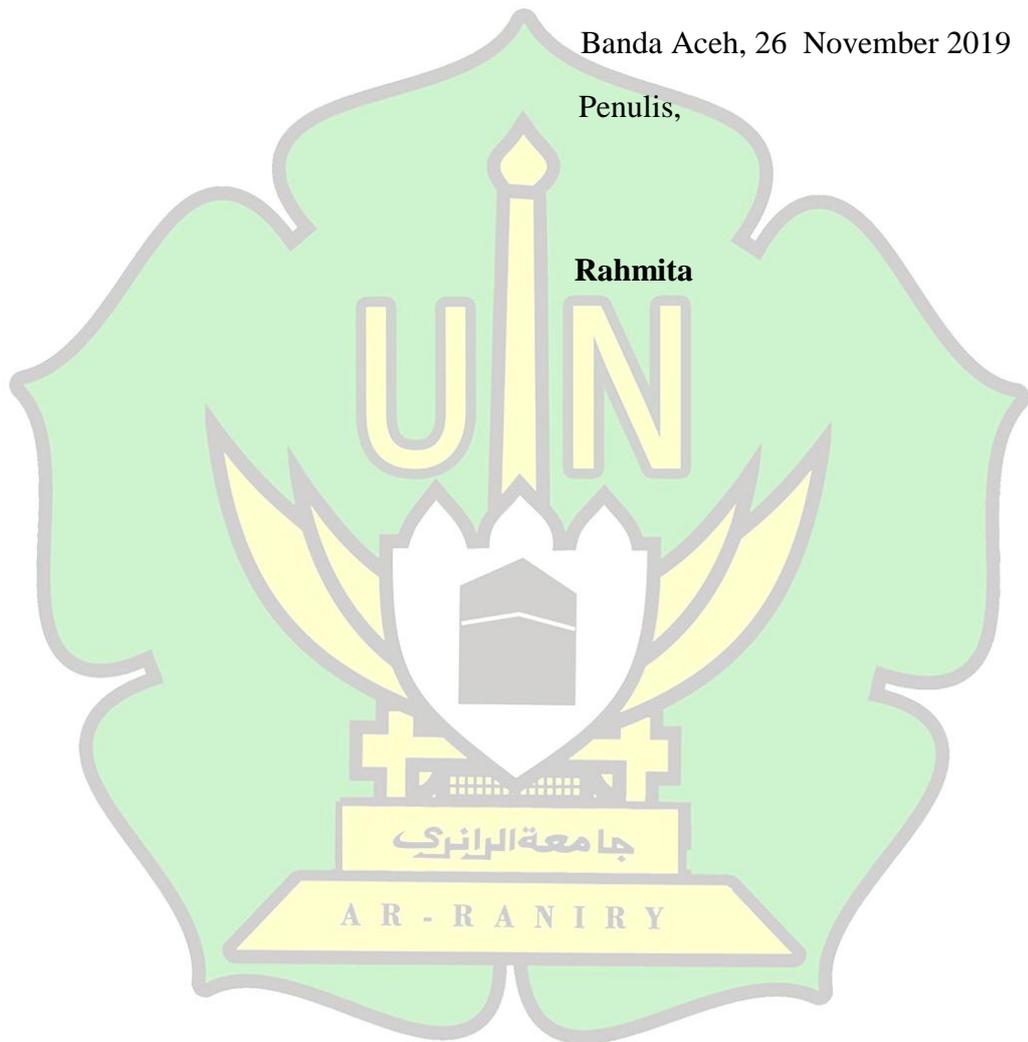
Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penyajian, maupun segi materi. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga akan memberikan suatu informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan pembaca menjadi bahan belajar dan inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bagus lagi.

Banda Aceh, 26 November 2019

Penulis,

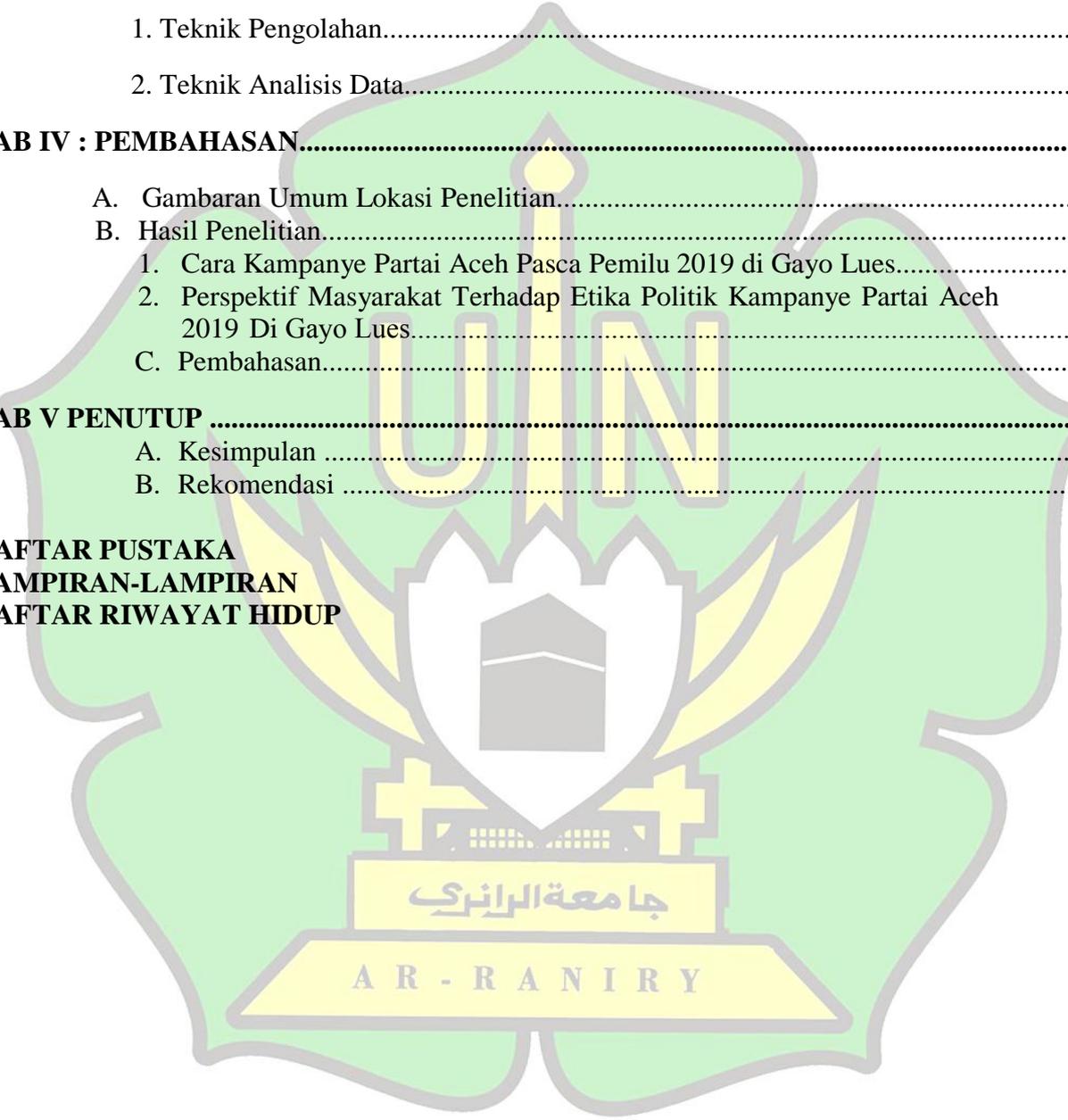
Rahmita



DAFTAR ISI

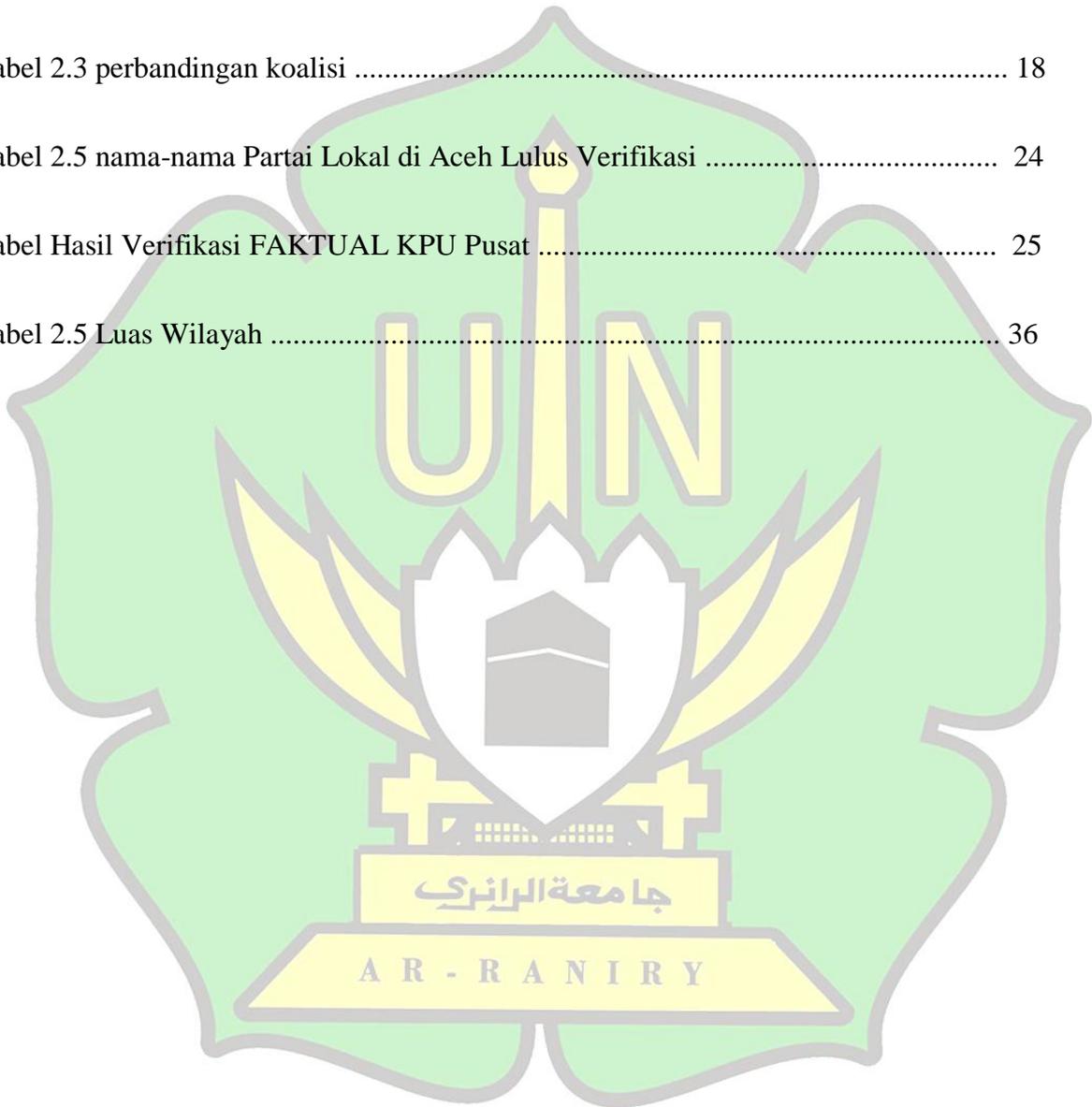
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka	9
BAB II : LANDASAN TEORETIS	10
2.1. Perspektif Masyarakat	11
2.1. Etika Politik	14
2.3. Kampanye	16
2.4. Tipologi Partai Politik	18
2.5. Partai Lokal	19
1. Sejarah Partai Aceh	24
2. Visi/Misi Partai Aceh	27
BAB III : METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	28
3.2. Subjek dan Informan Penelitian.....	29
3.3. Teknik dan Pengumpulan Data.....	30

1. Wawancara.....	30
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	30
1. Teknik Pengolahan.....	32
2. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV : PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Cara Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu 2019 di Gayo Lues.....	42
2. Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh 2019 Di Gayo Lues.....	47
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 2.1 Perspektif-Perspektif Sosiologi	10
Tabel 2.2 perbedaan kampanye politik dan kampanye pemilihan umum	16
Tabel 2.3 perbandingan koalisi	18
Tabel 2.5 nama-nama Partai Lokal di Aceh Lulus Verifikasi	24
Tabel Hasil Verifikasi FAKTUAL KPU Pusat	25
Tabel 2.5 Luas Wilayah	36



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar riwayat hidup.
2. Surat keputusan pembimbing/SK.
3. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Lembaga Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues.
5. Instrumen wawancara penelitian.
6. Foto wawancara



ABSTRAK

Kata Kunci: *Retorika Kampanye, Etika Politik.*

Kampanye politik seringkali terjadi kecurangan dalam Partai Aceh tahun 2014 pernah melakukan kecurangan yang menyimpang adanya kecurangan berupa janji yang ditawarkan juga mengerahkan massa dari seluruh kabupaten Aceh Satu dimana proses kampanye belum diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye pada saat itu, namun yang terjadi Partai Aceh berkonvoi dan mengiringi kampanye dengan membawa ribuan masyarakat dari berbagai daerah, itu sebabnya mereka diberi sanksi tegas dari KIP dan massa kampanye harus berhadapan dengan Polisi pada saat itu. Disinilah peneliti ingin melihat dua rumusan masalah sebagai bahan penelitian yaitu (1) Bagaimana cara kampanye Partai Aceh pasca pemilihan legislatif 2019 di Gayo Lues ? dan (2) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap etika politik kampanye Partai Aceh 2019 di Gayo Lues ?. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu kualitatif dan peneliti melakukan wawancara dengan orang partai, timses, tokoh adat, dan masyarakat semua berjumlah 16 orang di setiap kampungnya. Dari hasil penelitian dan wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa etika politik Partai Aceh dinilai tidak menciderai perpolitikan pada masa kampanye kemaren, karena bisa dilihat dari tanggapan masyarakat beserta orang partai. Mereka sama sekali tidak menciptakan kampanye yang buruk. Selain itu juga 4.200 kader Partai Aceh mampu membangun kerjasama yang baik dengan kader milineal muda sampai dewasa. Itulah yang membuat partai ini dikenal oleh masyarakat Gayo Lues, bahkan bupati juga datang dari kalangan Partai Aceh. Meskipun ada sedikit pencideraan Partai Aceh terhadap kampanye dalam etika perpolitikan yang dilanggar oleh partai yaitu tentang menjanjikan sebuah dana untuk beberapa orang termasuk dana perkebunan yang belum sampai ketangan masyarakat. Namun sejauh ini dari hasil penelitian dan serta tercatat Partai Aceh sudah memiliki kelayakan telah mengikuti kampanye sesuai dengan etika politik yang ada.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kampanye politik merupakan fenomena yang biasanya dipertontonkan oleh masing-masing partai politik terutama pada masa kampanye untuk mendapatkan dukungan maupun suara. Suatu partai yang berkampanye akan menyampaikan kepada kelompok massa untuk mendengarkan perintah. Dalam berkampanye tentu pasti menarik simpati masyarakat dengan mengkomunikasikan ideologi atau program kerja yang ditawarkan kepada kelompok massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dalam berkampanye kunci sukses kampanye politik adalah dengan adanya tim sukses yang menjadikan kampanye politik yang justru menarik simpati masyarakat dalam mengkomunikasikan ideologi ataupun program yang ditawarkan kepada massa untuk mendapatkan dukungan pada saat pemilihan umum legislatif. Selain itu, publik speaking yang baik ditawarkan oleh sekelompok timses yang harus cendikiawan mengolah publik speaking yang baik, sehingga pendengar merasa kagum atas ucapan dari timses.

Suatu partai juga mempertahankan statusnya terhadap massa yang ingin di pengaruhinya. Seperti massa kampanye pemilu atau pilkada, para calon legislatif, walikota, calon bupati, gubernur hingga presiden akan melakukan retorika kampanye. Biasanya ketika beretorika dan menyampaikan bahasa yang menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan juga dengan cara menyebar janji ke masyarakat sosial berupa hal umum yang sering didengar yaitu semisal

janji memberikan bantuan 1 juta per kk, sekolah gratis dan semisal beasiswa bagi mahasiswa.¹

Terlepas dari siapapun yang akan memenangkan partai pemilu menarik untuk dicatat seberapa banyak ucapan maupun janji-janji yang ditebar oleh Partai dalam memantau seberapa banyak dari sekian yang dapat terealisasi selama periode yang telah ditentukan berikutnya tidak cukup sampai disitu, para elitpun mempersiapkan dana besar untuk membayar segala persiapan acara kampanye tersebut mulai dari menyediakan makanan, menyediakan alat transportasi kepada masyarakat yang telah hadir dan tentunya menyukseskan masa kampanye partai.

Saat ini Partai Aceh adalah salah satu Partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam pemilihan umum legislatif Indonesia sejak tahun 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah provinsi Aceh yang diketuai oleh Teungku H.Muzakir Manaf. Partai Aceh dahulu bernama gerakan Aceh merdeka, kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Dalam pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 26 kursi dari 81 kursi di parlemen.

Pada saat Kampanye Partai Aceh mengeluarkan instruksi kepada seluruh calon legislatif dan tim pemenangan setiap desa maupun kecamatan yang dibentuk untuk menghentikan segala kampanye dalam bentuk apapun. Mulai dari kampanye lewat media sosial yang bertentangan dengan aturan pemilu 2009, tujuannya dikeluarkan instruksi itu supaya tidak ada jenis aktivitas kampanye ilegal yang bisa mencoreng nama Partai dan menciderai tahapan demokrasi di Aceh.

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern : Pendekatan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 15.

Larangan demikian diambil Partai Aceh setempat, sesuai petunjuk dari peraturan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang jadwal dan tahapan kampanye pemilu 2019. Dalam aturan ini, tahapan kampanye mulai dilaksanakan sejak 23 september 2018 sampai 13 april 2019. Peringatan ini diederakan oleh Partai Aceh, karena mulai khawatir dengan mulai gencarnya geliat kampanye terselubung kader serta simpatisan Partai politik yang tengah berlangsung ditingkat gampong, kebijakan Partai ini mengarahkan kepada tim-tim Partai agar tidak mencuri start kampanye.²

Berdasarkan realita tersebut tergambar cara kampanye terhadap perspektif etika politik salah satunya mewujudkan visi misi yang berkualitas, namun setelah ditinjau Partai Aceh ternyata ada permasalahan yang tidak terealisasi oleh Partai tersebut yaitu adanya kecurangan kampanye yang dilakukan oleh Partai Aceh tersebut dilanggar Partai mereka sendiri. Tentu pada saat itu diawasi oleh ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang menyebutkan Partai Aceh melanggar aturan kampanye karena mengerahkan massa dari daerah lain untuk mengikuti kampanye terakhir di Banda Aceh. Mereka melanggar peraturan KPU No.23/2008. Seharusnya kampanye Partai Aceh hanya dihadiri massa dari daerah pemilihan Aceh satu saja.

Namun Ribuan Partai Aceh dari Aceh Utara, Bireun, Lhoksemawe, Aceh Timur dan Aceh Tamiang, berkonvoi ke Banda Aceh untuk menghadiri kampanye babak terakhir. Selain mengikuti kampanye di Banda Aceh, ratusan lainnya juga dikerahkan ke pantai barat-selatan dengan berkampanye di Aceh Selatan, Kutacane, Gayo Lues, Singkil. Subussalam, Sinabang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Meulaboh dan Sabang.

² Jambo Muhajir, Diakses pada tanggal 12 Juni 2019, Pada situs: (<https://m.tribunews.com/pilpers-2009/2018/09/03/dua-elit-partai-aceh-beda-pilihan-muzakir-manaf>).

Di saat itu Pengawas Panitia Pemilu atau KIP sudah melayangkan surat teguran kepada pengurus Partai Aceh dan meminta Polisi menghadang iring-iringan konvoi kendaraan kader Partai Aceh yang bergerak ke Banda Aceh. Hal ini merupakan salah satu realita retorika kampanye yang melanggar kode etika perpolitikan bahkan menciderai demokrasi. Seharusnya yang dilakukan adalah dengan tidak melakukan pelanggaran diluar kampanye.

Bahkan tergambar dari Partai tersebut sudah melanggar banyak aturan yang berlaku dalam proses kampanye dan hanya demi sebuah kepentingan untuk meraih dukungan dan suara serta membangkitkan Partai melalui jalan yang salah, ini adalah salah satu retorika kampanye Partai Aceh yang tidak baik, padahal proses kampanye akan sukses apabila tidak melakukan pembodohan masyarakat serta tidak ada intimidasi kepada khalayak umum.

Ketika proses kampanye tidak sesuai dengan etika politik yang ada, maka terjadilah kecurangan yang berlangsung pada masa kampanye, padahal setiap pemilu akan ada pemberitahuan untuk semua calon maupun partai yang ingin menjadi salah satu kandidat dengan tidak melakukan kecurangan pada masa kampanye berlangsung serta akan ada teguran-teguran kepada calon kandidat yang melakukan kecurangan akan dicopot dan tidak diperbolehkan ikut dalam pemilu.

Dapat disimpulkan dari paparan diatas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan partai tersebut serta menjadi tolak ukur bagaimana etika sebuah Partai yang mencerminkan kampanye yang baik terhadap masyarakat. Dengan judul *“Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik*

*Kampanye Partai Aceh” dengan “Studi Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 Di Gayo Lues”.*³

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang ingin dicarikan jawabannya. Rumusan masalah juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana cara kampanye Partai Aceh pasca pemilihan legislatif 2019 di Gayo Lues ?
2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap etika politik kampanye Partai Aceh 2019 di Gayo Lues ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah target atau sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui cara kampanye Partai Aceh (PA) pasca pemilihan legislatif 2019 di Gayo Lues ?
2. Mengetahui perspektif masyarakat terhadap etika politik kampanye Partai Aceh 2019 di Gayo Lues ?

³ Abu Zakar, *Komunikasi Efektif Politik*, (Bandung: PT Cempaka, 2012), hlm. 245.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoretis

1. Untuk mengetahui bagaimana etika partai politik di Aceh dalam memerankan kampanye secara baik.
2. Secara akademis dapat menambah referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Uin Ar Raniry Banda Aceh dalam memperkaya teori dan wawasan Ilmu Pemerintahan.
3. Mendapatkan manfaat dari penelitian yang memperkuat teori yang penulis sudah cari, sehingga penelitian ini menghasilkan kepuasan bagi penulis dan juga membuahkan hasil penelitian yang semakin mempunyai hasil akhir yang memuaskan bagi saya. Dan juga dari penelitian sebelumnya dapat memperkuat teori yang sudah saya cari.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Aceh terhadap elit politik dan melalui penelitian ini diharapkan menjadi ajuan khususnya kepada partai lokal di Aceh.
2. Terutama bagi penulis dapat meningkatkan hasil penelitian yang membuat saya belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga saya bisa menerapkan materi pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

Menurut pengamatan penulis pembahasan mengenai masalah “Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh” (Studi Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 di Gayo Lues) belum ada yang meneliti namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya:

1. Penelitian dilakukan oleh Saiful Amri dengan judul *Perspektif Opini Publik Terhadap Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 Di Aceh Barat*. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan opini publik di Kecamatan Samatiga yang menunjukkan pendapat yang berbeda-beda oleh setiap individu terhadap Partai Aceh. Opini publik terhadap Partai Aceh akan terus berkembang dikalangan masyarakat kecamatan Samatiga, oleh karena itu Partai Aceh harus segera menstabilkan semua bentuk permasalahan yang telah terjadi pada masa pemerintahannya jika tidak akan mungkin kepercayaan masyarakat semakin menjauh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor tumbuhnya opini publik di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat terhadap Partai Aceh meliputi faktor latar belakang sejarah, faktor biologis (perbedaan sikap), faktor isu, dan faktor sosial (kedudukan partai politik). Beberapa faktor yang telah disebutkan menjadi tolak ukur timbulnya opini dan perspektif masyarakat terhadap Partai Aceh di Kecamatan Samatiga.

Perbedaan penelitian ini ialah menggunakan observasi dan dalam penelitian terdahulu memakai penelitian yuridis normatif. Adapun Persamaannya

dengan penulis teliti adalah perspektif masyarakat terhadap Partai Aceh dan metode penelitian kualitatif yang sama dengan penelitian penulis.⁴

2. Penelitian ini dilakukan oleh Junanda Manurung dengan judul *Perspektif Masyarakat Terhadap Pilkada dalam Studi Kasus Masyarakat di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masyarakat kelurahan Padang Matinggi yang menginginkan figur Walikota yang peduli pada rakyatnya, yang berintegritas, berkualitas dan berkompeten. Yang dimaksud dengan berintegritas adalah bertanggung jawab, jujur, tidak melakukan praktek KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) serta berkeadilan dan bisa dipercaya.

Masyarakat memiliki persepektif bahwa pilkada langsung menghasilkan figur Walikota dan Wakil Walikota seperti yang mereka inginkan (berintegritas, berkualitas dan berkompeten). Namun, bukan berarti masyarakat sepakat bila pilkada pada periode 2013-2018 yang lalu benar-benar menghasilkan Walikota yang sesuai yang diinginkan masyarakat.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode gabungan yaitu kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang dihasilkan berupa angka dan deskripsi. Persamaannya sama-sama membahas Perspektif masyarakat terhadap pilkada.⁵

3. Penelitian ini dilakukan oleh Iwan Ismi Febriyanto dkk dengan judul “Partai Politik Lokal Aceh Dalam Perspektif Demokrasi”. Penelitian ini menemukan hasil fenomena kemunculan partai politik lokal Aceh pada

⁴ Saiful Amri, *Perspektif Opini Publik Terhadap Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 di Aceh Barat*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh 2013.

⁵ Junanda Manurung, *Perspektif Masyarakat Terhadap Pilkada dalam Studi Kasus Masyarakat di Kelurahan Padangsidempuan 2013-2018*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan 2018.

tahun 2006 yang lalu merupakan bentuk dari suatu entitas atau subjek dalam politik baru kancah konstelasi politik nasional. Masyarakat lokal Aceh dengan Pemerintahan Indonesia sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan yang terjadi dinegeri ini. Selain itu faktor sosial budaya Aceh (penerapan syariat islam) merupakan suatu pembedaan sekaligus dilema bagi pemerintahan nasional dalam membuat kebijakan.

Selain itu terbentuknya demokrasi perspektif demokrasi karena adanya hegemoni yang merupakan fondasi dasar dari terbentuknya demokrasi radikal sehingga terjadi pada masyarakat Aceh yang mentransformasikan dalam bentuk partai politik lokal. Pembentukan demokrasi radikal pada masyarakat Aceh sejatinya sudah lama.

Dimana pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam membangun peradaban yang berdasarkan syariat islam. Selain itu praktik atau kemunculan partai politik lokal patut dijadikan koleksi bagi pemerintahan negara Indonesia. Dalam negara yang memiliki kekayaan budaya dan daerah yang sangat beragam ini kemungkinan terjadi konflik lokal merupakan awal dari bangkitnya politik daerah.

Perbedaan penelitian ini adalah adalah memfokuskan pada perspektif demokrasi partai lokal di Aceh dan penerapan serta penentangan masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh. Selain itu pertentangan pemerintahan Indonesia semakin tidak sejalan dan susah diajak kerjasama. Namun persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan wawancara serta persamaan lainnya lebih mendengar perspektif masyarakatnya.⁶

⁶ Iwas Ismi Febriyanto dkk, *Partai Politik Lokal Aceh Dalam Perspektif Demokrasi Radikal*, Tesis Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya, Brawijaya 2017.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1. Perspektif Masyarakat

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal, dengan perspektif orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional.

Perspektif sosiologi merupakan pada konteks sosial dalam mana manusia hidup. Perspektif sosial mengkaji bagaimana konteks tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Perspektif sosiologi merupakan pola pengamatan ilmu sosiologi dalam mengkaji kehidupan masyarakat dengan segala aspek atau proses sosial kehidupan didalamnya. Dalam penjelasan perspektif ada beberapa perspektif berikut ini:

Tabel 2.1 Perspektif-Perspektif Sosiologi

Perspektif tentang	Teori FunkSIONALIS	Teori Konflik
Masyarakat	Suatu sistem yang stabil dari kelompok-kelompok yang bekerjasama	Suatu sistem yang tidak stabil dari kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang saling bertentangan
Kelas Sosial	Suatu tingkat status dari orang-orang yang memperoleh pendapat dan memiliki gaya hidup yang serupa berkembang dari isi perasaan orang dan kelompok yang berbeda	Sekelompok orang yang memiliki kepentingan ekonomi dan kebutuhan kekuasaan yang serupa berkembang dari keberhasilan sebagian orang dalam mengeksploitasi orang lain

Perbedaan Sosial	Tidak dapat dihadirkan didalam susunan masyarakat kompleks. Terutama disebabkan perbedaan kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda	Tidak perlu dan tidak adil. Terutama disebabkan perbedaan dalam kekuasaan. Dapat dihindarkan dengan jalan penyusunan kembali masyarakat secara sosialis
Perubahan Sosial	Timbul dari perubahan kebutuhan fungsional masyarakat yang terus berubah	Dipaksakan oleh suatu kelas terhadap kelas lainnya untuk kepentingan kelas pemaksa
Tata tertib sosial	Hasil usaha tidak sadar orang untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka secara produktif	Dihasilkan dan dipertahankan oleh pemaksa yang terorganisasi oleh kelas-kelas yang dominan
Nilai-nilai	Konsensus atas nilai-nilai yang mempersatukan masyarakat	Kepentingan yang bertentangan akan memecahbelah masyarakat khayalan(ilusi) nilai-nilai dipertahankan yang dominan
Lembaga-lembaga sosial	Menanamkan nilai-nilai kesetiaan yang mempersatukan masyarakat	Menanamkan nilai-nilai yang melindungi golongan yang mendapatkan hak istimewa
Hukum dan pemerintahan	Menjalankan peraturan dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat	Menjalankan peraturan yang dipaksakan untuk melindungi hak-hak istimewa

Berbagai perspektif digunakan dalam sosiologi. Masing-masing memandang masyarakat dari perspektif yang berbeda. Namun, pada dasarnya setiap perspektif sampai tingkat tertentu digunakan oleh sosiologi dan diperlukan untuk memperoleh pengertian yang menyeluruh tentang suatu masyarakat.⁷

⁷ James M. Henslin, “Sosiologi dengan pendekatan membumi”, (Jakarta: Erlangg, 2007), hlm 4-9.

2.2. Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”, artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sementara itu, etika diartikan dua hal. Pertama etika sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etika sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika didefinisikan sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasikan tentang tindakan moral yang betul. Dari pandangan tersebut, etika dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan mana yang dianggap buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada umumnya etika bersifat universal, berlaku umum dimanapun masyarakat berada atau bersifat mutlak. Namun, karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, maka etika dapat pula bersifat partikular dan relatif.

Melihat etika politik dalam situasi apapun, baik normal, aman, tertib, dan terkendali maupun tidak tertib atau kacau, etika politik semakin relevan. Pertama etika politik berbicara tentang otoritas, yaitu betapa kasar dan tidak santunnya suatu politisi, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi merujuk pada norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan dan perundangan. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban, tentu korban akan membangkitkan protes dan ketidakadilan.

Dalam demensi etika politik tujuannya mengandalkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan hidup damai didasarkan pada kebebasan dan

keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian dan tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan juga mendasari institusi-institusi sosial. Dalam dimensi ‘aksi politik’, pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral pelaku.⁸

Etika politik bukanlah sekadar gagasan himbauan moral yang naif bila dikaitkan dengan kehidupan politik praktis. Minimum ada tiga prinsip yang secara metodologis dapat dijadikan untuk mengukur muatan etika politik dari sebuah politik. Prasyarat pertama adalah prinsip kehati-hatian (*principle of prudence*), sebuah prinsip yang mempertanyakan secara kritis tentang latar belakang pemihakan dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dari para pemegang kunci kekuasaan politik.

Dalam prinsip ini, sebuah tindakan yang memiliki motif untuk “memihak” kepentingan lebih luas dibanding dengan kepentingan sempit partai atau diri sendiri akan memiliki nilai etika yang jauh lebih tinggi dan terpuji. Prinsip kedua adalah prinsip tatakelola (*principle of governance*) yang berhubungan dengan masalah etika di dalam proses pengambilan keputusan ataupun penentuan tindakan. Prinsip ini menyangkut pengukuran terhadap standar-standar yang digunakan didalam menentukan sebuah tindakan ataupun kebijakan. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan soladiritas, secara otomatis, akan melahirkan perilaku dan keputusan yang jauh lebih etis.

Prinsip yang ketiga adalah prinsip pilihan rasional (*principle of rational choice*) yang secara metodologis menimbang secara seksama atas manfaat dan biaya (*costs and benefits*) dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dalam rangka

⁸ Eko Handoyo, Martien Herna Susanti, dan Moh. Aris Munandar., “*Etika Politik*”, (Semarang: Penerbit Widya Karya Press 2008), hlm. 59-60.

kepentingan umum. Sebuah tindakan atau keputusan yang memiliki manfaat yang sangat tinggi dan signifikan bagi kepentingan umum jauh lebih etis dibanding tindakan yang hanya melayani kepentingan pribadi ataupun kepentingan manuver partai politik yang sesaat.

Dalam kehidupan politik sehari-hari, baik biaya (costs) maupun manfaat (benefits) tidak selalu hadir dalam bentuk fisik-material. Namun juga kedua aspek tersebut dapat diurai dalam bentuk nilai-nilai simbolik seperti stabilitas, soladiritas, ataupun loyalitas. Jika dilihat dari sisi tujuannya, kehidupan manusia adalah kehendak untuk berkuasa, dan ini harus diterjemahkan ke dalam kesempurnaan yang melebihi dimensi-dimensi kebaikan dan keburukan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Oleh sebab itu semakin jelas bahwa perlu mengingatkan pentingnya muatan etika politik sebagai acuan bersama bagi jagat perpolitikan. Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga negara yang harus mempunyai tujuan politik untuk mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Serta membantu dalam menganalisis korelasi antara tindakan individual maupun sosial. Untuk menghindari pemahaman etika politik yang tidak baik.⁹

2.3. Kampanye.

Kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide serta sikap dan perilaku tertentu. Kampanye

⁹ M. Sidi Ritaudin., "Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis Dan Rasional Politik Bangsa". *Jurnal Tapis* Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014, hlm. 22-23.

politik adalah sebuah peristiwa yang bisa didramatisasi. Oleh karena itu kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh aktor aktor politik.¹⁰

Sedangkan bila kita mencoba melakukan pemahaman tentang kampanye, maka ia dimengerti sebagai suatu komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar menggunakan atau tidak menggunakan suara seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.

Bagaimana pula dengan batasan, pengertian kampanye politik yang dibuat oleh berbagai ahli, yaitu:

1.Pippa Norris

Kampanye politik sebagai proses komunikasi politik, dimana partai politik sebagai proses komunikasi politik atau kontestan individu berusaha mengomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan.¹¹

2.Hafied Cangara

Kampanye politik ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak penyabar atau pemberi informasi.¹²

3.Ronald E.Rise dan William J. Paisley

Kampanye politik adalah strategis kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang di programkan oleh partai politik.¹³

¹⁰ Zulkarni , “ *Pengantar Sosiologi Politik Antara Komunikasi, Kampanye, dan Marketing*”, (Depok: PT Cempaka Tirta 2011), hlm. 225-234.

¹¹ Pippa Noris, “*Sosiologi Filsuf*”, (Jakarta:PT Erlangga 2009), hlm. 78-82

¹² Hafied Cangara, “*Komunikasi Politik, Konsep, Teori, Dan Strategi*”, (Bandung: PT. Raja Grafindo 2009), hlm. 284.

¹³ Ronald dkk, “*Sosiologi Konsep Politik*”, (Bandung: Rajawali pers 2009), hlm. 123.

Pengertian kampanye politik yang ditelusuri melalui kamus dan pengertian menunjukkan cakupan batasan pengertian yang relatif tidak longgar, sehingga kampanye yang berdemensi politik tidak terlingkup di dalamnya. Padahal bisa saja aktivis dari *civil society* melakukan kampanye politik secara rasional, misalnya menolak untuk politisi busuk masuk kedalam legislatif. Batasan yang diberikan oleh Norris, Rises dan Paisley tentang kampanye politik termasuk dalam kategori ini, yaitu pengertian yang relatif sempit. Sedangkan pengertian kampanye politik yang relatif luas adalah seperti yang ditulis oleh Cangara, sehingga aktivitas politik dari *civil society* tercakup di dalamnya.

Untuk memahami kampanye politik dan kampanye pemilihan umum sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan Kampanye Politik dan Kampanye Pemilihan Umum.

	Kampanye Pemilu	Kampanye Politik
Jangka dan batas waktu	Periode tertentu	Jangka panjang dan terus menerus
Tujuan	Menggiring pemilih ke bilik suara	Image politik
Strategi	Memobilisasi dan berburu pendukung	Membangun dan Membentuk reputasi politik
Komunikasi politik	Satu arah dan penekanan kepada janji dan harapan politik kalau menang pemilu	Interaksi pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat
Sifat hubungan dan pemilih	Pragmatis/transaksi	Hubungan relasional
Produk politik	Janji dan harapan politik figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi Ideologi dan sistem nilai partai
Sifat kampanye	Berubah-ubah dari pemilu satu ke pemilu satu ke pemilu lainnya Cenderung mudah hilang. Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya.	Konsisten dengan sistem nilai parta tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif Bersifat laten, Bersikap kritis sekali dan menarik simpati masyarakat.

Sedangkan kampanye pemilu yang serba singkat tersebut perlu di dukung terus-menerus melalui kampanye politik yang bersifat jangka panjang, sehingga

janji dan harapan politik yang ditawarkan pada kampanye pemilu diperkuat melalui reputasi dan image politik.¹⁴

2.4. Tipologi Partai Politik

Ada beberapa dari sudut pandang mengenai tipologi partai politik yang dilihat dari berbagai sudut pandang dan dari jumlah partai politik yang berkembang pada suatu Negara. Terdapat beberapa tipe partai politik, yaitu antara lain:

a. Partai Tunggal

Hanya ada di Negara Vietnam dan China yang menganut sistem otoriter artinya penguasa membolehkan dalam satu Negara hanya satu partai saja. Sebab bila ada bibit partai baru akan bertunas dengan segera dicabut oleh satu kekuasaan yang tanpa batas

b. Dwipartai

Sistem dwipartai dimungkinkan hadir dalam sistem politiknya yang mana pemilihan umumnya berdasarkan *simple majority*, yaitu setiap daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu orang wakil.

c. Multipartai

Sistem ini memperlihatkan berbagai partai dan dibebaskan untuk dalam satu Negara memiliki partai lebih dari dua bahkan sasmpai sepuluh partai. Oleh sebab itu, pemerintahan sering dibentuk oleh dua atau lebih partai dalam wadah koalisi.

Sistem kepartaian dibangun atas dasar pluralitas dan demokrasi. Sistem ini dicirikan sebagai partai tunggal, dwi partai dan multi partai. Biasanya ada perbandingan keinginan dalam wadah koalisi yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Norris, Rises, Paisley dan Cangara, “*Sosiologi Konsep Politik*”, (Bandung:Rajawali Pers 2012), hlm. 145.

Tabel 2.3 Perbandingan Koalisi

	Integratif	Kompetitif
Dukungan	Regional, kelas, sangat ideologis	Berorientasi klien dan pragmatis
Organisasi	Tertutup, otoriter	Terbuka artinya serba boleh
Jumlah partai dan cara kegiatan yang di fungsi	Menyebarkan, menekankan dan integrasi nasional, satu partai.	Terspesialisasi dan representatif dua atau lebih.

Partai politik bisa juga dikelompokkan atas beberapa tipe berdasarkan basis perolehan suara.

1. Partai massa

Partai massa dibangun atas kemampuan untuk memobilisasi yang mengambang. Partai melakukan mobilisasi massa dengan memperhatikan keberagaman massa yang ada dan menempatkan partai melindungi semua golongan dan juga lapisan masyarakat yang ada.

2. Partai kader

Partai ini memfokuskan perhatian bagaimana mampu merekrut orang menjadi anggota partai. Untuk melakukan itu berbagai jenjang pelatihan dibuat agar seseorang bisa direkrut untuk jabatan politik tertentu di partai, parlemen dan pemerintahan.

Partai politik juga mempunyai latar belakang primordialisme dapat menjadi dasar pembentukan tipologi partai politik, yaitu:

1. Partai kelas sosial yaitu partai dibentuk karena membedakan antara kelas pekerja dengan kelas aristokrat sehingga muncullah partai baru.
2. Partai agama lebih mencantumkan pada ideologi agama tersebut semisal Kristen dan islam, jadi tidak ada persamaan semua tergantung ideologi mana yang dipakai.

3. Partai sekuler ini memisahkan diri dari ruang agama, negara di urusi oleh pemerintahan dan agama diurusi oleh agama.
4. Partai Netral yaitu partai partai yang mengedepankan sikap netral dengan cara partai politik dibangun atas dasar agama dan partai, partai juga tak boleh menentang etika politik sesuai agama yang di ajarkan, sehingga pembuktian tersebut mengedepankan sikap yang tidak pilih kasih.¹⁵

2.5. Partai Lokal Aceh

Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga resmi. Selain itu partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Serta merebut dukungan masyarakat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Poin 2: Partai Politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin (27): persyaratan sebagai peserta pemilu.

¹⁵ Sartori, *“Party and Party System: A Framework For Analysis”*, (Medan:PT Firma 2009), hlm. 155.

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.¹⁶

1. Sejarah Partai Aceh

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditanda tangani pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang ada di Aceh yang memenuhi syarat Nasional.

Oleh karena itulah, Pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, SH atau sering disebut Muhammad Yahya Mu'ad, SH untuk membentuk partai politik lokal (Partai GAM) Pada tanggal 19 Febuari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH, akta notaris pada tanggal 07 Juni 2007, menggunakan lambang bulan bintang, lambang GAM. Sehingga lahirlah Peraturan Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang partai.

Sementara itu dalam surat Kanwildepkum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk Partai Aceh harus ada kepanjangan. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverfikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kanwilkum Hukum dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Merdeka. Dari situlah, pihak

¹⁶ Syamsuddin, "Dinamika Partai Politik Lokal Studi Partai Aceh Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Aceh Timur" Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, hlm. 68-69.

Kanwilkom menyurati Partai Gerakan Aceh Merdeka diubah lagi namanya menjadi Partai Aceh.

Setelah itu rekrutman calon legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh dan impleentasinya MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dan juga Partai Aceh berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air.¹⁷

2. Visi/Misi Partai Aceh

Visi Partai Aceh membangun cira berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman (MoU Helsinki) yang telah ditandatangani pada Tanggal 15 Agustus antara Pemerintah RI dan GAM. Sedangkan misinya adalah “Menstranformasi dan membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari *cirta revolusi party* dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.

3. Tujuan Partai Aceh

Tujuan Partai Aceh adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama, dan Negara.
- Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada Tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.
- Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata material dan spritual bagi seluruh rakyat Aceh

¹⁷ *Ibid., hlm. 153.*

- Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran dan keadilan.¹⁸

Persiapan GAM mendirikan partai sudah terlihat akhir 2005. keinginan tersebut ditegaskan dalam pertemuan GAM sedunia di Banda Aceh pada 23-24 Mei 2006. Partai dibawah naungan GAM diresmikan setahun setelah pertemuan tersebut. Bendera dan nama GAM digadang sebagai simbol yang dijual partai. Malik Mahmud dan Muzakir Manaf ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua, jabatan sekretaris Jenderal di pegang Tengku Muhammad Nazar.

Penggunaan lambang dan nama GAM menuai protes. Tidak hanya dari internal GAM, Pemerintah dan DPR menolak penggunaan simbol tersebut. Usai peresmian sekretariat partai. Kepolisian kota besar Banda Aceh menyurati pimpinan Partai GAM untuk menurunkan atau menutup plang nama dikarenakan telah melanggar perjanjian Helsinki. Menko Polhukam Widodo AS dalam rapat kerja dengan komisi 1 DPR tegas mengatakan Partai lokal yang menampilkan atribut GAM tidak sesuai dengan semangat perdamaian Aceh.

Banyak pihak yang menaruh curiga terhadap penggunaan nama dan lambang itu. Persatuan tersebut lebih dinilai sebagai sebuah sinyal untuk memberontak kembali dan melanggar MoU Helsinki. Ketua komisi 1 DPR, Theo L Sambuaga, kita memenag harus tegas tidak memberikan izin kepada partai lokal yang mengenakan simbol GAM, karena itu tidak dikenal dalam MoU Helsinki.

Butir 4.2 Nota Kesepahaman Damai Tertutlis, GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman. Perdebatan tentang Parlok dan Parnas yang akan bertarung di Aceh

¹⁸ *Ibid., hlm. 154.*

dalam pemilu 2009 menghiasi media dengan intensitas pemberitaan yang Perdebatan tentang Parlok dan Parnas yang akan bertarung di Aceh dalam pemilu 2009 menghiasi media dengan intensitas pemberitaan yang lebih tinggi.¹⁹

Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Depkum HAM itu mengatakan, kelengkapan administrasi itu mutlak dipenuhi setiap Parlok peserta Pemilu 2009. Hal itu mengacu kepada UU Nomor 11/2006, PP Nomor 20/2007 tentang Parlok di Aceh dan petunjuk Pelaksanaan Menkum HAM RI Nomor M-08.UM.08/2007 tentang pendaftaran Parlok di Aceh. Berikut ini nama-nama parlok yang lulus verifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.5. Nama-Nama Partai Lokal di Aceh Lulus Verifikasi

1	Partai Darussalam Ketua : Hari Iskandar, SE Sekretaris : Firman Kamal, SH Bendahara : Razali Ibrahim, S.Pdi Kantor : Jl. Syiah Kuala No. 6 Kompleks YPUI, Banda Aceh	2	Partai Rakyat Aceh (PRA) Ketua : Ridwan H. Mukhtar Sekretaris : Thamre Bendahara : Malahayati Kantor : Jl. T. Iskandar No. 174 Desa Langeulumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh
3	Partai Pemersatu Ketua : T. Eddy Faisal Rusydi, SH Ketua : Muslimin Aceh Sekretaris : Rgk Abdul Madjid	4	Partai Aceh Ketua : Muzakkir Manaf Sekretaris : M Yahya, SH Bendahara : Hasanuddin Kantor : H Tgl Imam Al-Asyi Luengbata, No. 48 Banda Aceh.
5	Partai Gabthat Ketua : Tgk M Samalanga Sekretaris : T Zulfahmi BTM Bendahara : T Suryanto Kantor : T Nyak Arief, Pasar Lamnyong, Lingke	6	Partai PARA Ketua : Dra. Hj. Zulhafah Luthfi, MBA Sekretaris : Dra. Nurjannah, MSi Bendahara : Nurfajriah Kantor : Jl. Ratu Safiatuddin, banda Aceh

¹⁹ Teuku Kamal Farsya, di Akses Pada Tanggal 19 Desember 2019, Pada Situs <http://www.Serambinews.edisi28/4/2006>.

7	Partai Aceh Meudaulat (PAM) Ketua : Tgk Syahbuddin Hasan Sekretaris : Mahbud Junaidi Bendahara : Cut Riska, AMD. Keb Kantor : Kompleks Vila Buana, Gardenia, No. 160 Desa Lampasi Enking, Aceh Besar Medaulat (PAM)	8	Partai Lokal Aceh Ketua : Drs. HM Munir Aziz, M.Pd Sekretaris : Mahbud Junaidi Bendahara : Muzakir Kantor : Jl. K. Amin, Beurawe, Banda Aceh
9	Partai Daulat Aceh Ketua : Tgk Nurkalis, MY Sekretaris : Tgk Mulyadi M Ramli,S Pd.I Bendahara : Amiruddahri Kantor : Jl. T. Iskandar, Desa Lambhuk, Banda Aceh	10	Partai Aceh Aman Sejahtera Ketua : Drs. H. Ghazali Abbas Adan Sekretaris : Drs. H. Nusri hamid Bendahara : Faisal Putra Yusuf Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh
11	Partai Bersatu Atjeh (PBA) Ketua : Dr. Ahmad Darhan Hamid, MS Sekretaris : Muhammad Saleh, SH Bendahara : H. Ridwan Yusuf, SE Kantor : Jl. Gabus No. 6 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh	12	Partai Suara independent Rakyat Aceh (SIRA) Ketua : M. Taufiq Abda Sekretaris : Arhama (Dawan gayo) Bendahara : Faurizal Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh

Keberadaan parlok dan persaingan politik diantara parnas akan mewarnai konstelasi politik Aceh dan bagaimana pemerintah nasional menghadapi pemerintahan Aceh pasca pemilu. Sebab, tidak semua masalah Aceh diselesaikan di tanah Aceh sendiri, melainkan masuk ke dalam sistem politik nasional. Bagaimanapun, Nota Kesepakatan (MoU) ataupun UU No. 11/2006 adalah bagian dari kebijakan politik nasional, sekalipun dorongan dan masukan dari unsur-unsur masyarakat Aceh juga bisa diabaikan dan signifikan. Masa depan Aceh akan tercermin dari sukses atau tidaknya serta hasil pemilu legislatif Aceh 2009.²⁰

²⁰ Saifuddin Bantasyam, "Parlok Vs Parnas dalam pemilu", Edisi Serambi Indonesia 2009, hlm 12.

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik.

Tabel Hasil verifikasi faktual KPU Pusat Pada Tanggal 8 Juli 2008 hanya 6 partai lokal Aceh Yang Lolos Untuk Dapat Ikut Menjadi Peserta Pemilu 2009 Yaitu :

1	Partai Aceh Ketua : Muzakkir Manaf Sekretaris : M Yahya, SH Bendahara : Hasanuddin Kantor : H Tgl Imam Al-Asyi Luengbata, No. 48 Banda Aceh.	2	Partai Rakyat Aceh (PRA) Ketua : Ridwan H. Mukhtar Sekretaris : Thamre Bendahara : Malahayati Kantor : Jl. T. Iskandar No. 174 Desa Langeulumpang,Ulee Kareng, Banda Aceh
3	Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) Ketua : M. Faufiq Abda Sekretaris : Arhama (Dawan Gayo) Bendahara : Faurizal Kantor : Jl. T.Nyak Arief No. 110. Banda Aceh	4	Partai Aceh Aman Sejahtera Ketua : Drs. H. Ghazali Abbas Adan Sekretaris : Drs. H. Nusri hamid Bendahara : Faisal Putra Yusuf Kantor : Jl. T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh
5	Partai Bersatu Atjeh (PBA) Ketua : Dr. Ahmad Darhan Hamid, MS Sekretaris : Muhammad Saleh, SH Bendahara : H. Ridwan Yusuf, SE Kantor : Jl. Gabus No. 6 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh	6	Partai Daulat Aceh Ketua : Tgk Nurkalis, MY Sekretaris : Tgk Mulyadi M Ramli,S Pd.I Bendahara : Amiruddahri Kantor : Jl. T. Iskandar, Desa Lambhuk, Banda Aceh

Kehadiran partai politik lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui partai politik tetap terasa hampa. Hadirnya 12 partai politik lokal di wilayah yang hanya dihuni empat juta

jiwa penduduk penunjukkan adanya dinamika politik yang cukup tinggi dalam mengartikulasikan kepentingan melalui jalur formal.

Kehadiran partai yang banyak ini untuk memperebutkan 2,2 juta suara yang berhak memilih juga menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan politik secara sah. Kehadiran partai politik lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini melalui partai politik nasional tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktifis partai politik nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk partai politik lokal dibandingkan memperkuat partai politik nasional yang telah mapan.²¹

Ada empat alasan politik yang mengemukakan perihal perbedaan pemahaman dan implementasi dalam melihat eksistensi partai politik lokal di kedua provinsi tersebut. *Pertama*, upaya mengulur-ulur waktu pemerintah diasumsikan akan membuat tuntutan akan keberadaan partai politik lokal menjadi bias dan tidak fokus. Padahal langkah tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Selain akan ada aksi sepihak penolakan terlibat dalam pelaksanaan nota kesepahaman, juga dikuatirkan ada langkah mundur dari upaya mencari solusi damai.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan politik lokal, khususnya dari wilayah konflik yang memiliki keinginan yang ekstra dan bersifat khusus. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat bagaimana RUU

²¹ Muhammad Jafar Aw, “*Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, Tesis Fakultas Ilmu Politik Pasca Sarjana, Universitas Penegoro, Semarang, 2009.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh masih mengundang perdebatan antara rancangan yang dibuat pemerintah dengan usulan dari pihak eks GAM.

Ketiga, adanya aturan legal yang saling berbenturan satu dengan yang lain menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan implementasi, khususnya pada esensi keberadaan partai politik lokal, yang harus merevisi setidaknya empat undang-undang, yakni: UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bersama Perpu No. 3 Tahun 2005, dan UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 21 Tahun 2001 menyangkut kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua provinsi tersebut.

Keempat, adanya trauma politik yang menghinggapi pemerintah perihal keberadaan partai politik lokal yang akan mengarah kepada upaya pergerakan tuntutan untuk merdeka, dan memisahkan diri dari NKRI. Trauma politik ini berimplikasi kepada kurang responnya pemerintah dalam melihat esensi dari pembangunan politik lokal, dengan mengedepankan mekanisme kontestasi bagi masyarakat.²²

²² Rizwan Haji Ali, “Partai Lokal Untuk Rakyat”, di Akses Pada Tanggal 20 Desember 2019 disitus, <http://putraaceh.multiply.com/journal/item/675>. 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang diteliti.²³ Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Adi Prastowo metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.²⁴

Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁵ Metode deskriptif kualitatif ini berguna dalam mengumpulkan informasi yang faktual mengenai penelitian “*Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh, Study Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 Di Gayo Lues*”.

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

²⁴ Bodgan dan Taylor Dalam Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 24.

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 3.

3.2. Subjek dan Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel, dan mengidentifikasi subjek penelitian melalui fenomena dan data yang diperoleh di lapangan. Alasannya karena penelitian ini jenis deskriptif, subjek yang dipilih adalah yang berkenaan dengan penelitian ini. Pemelihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.²⁶

Penelitian ini menggunakan teknik *pruposive* sampling, yaitu teknik yang telah ditetapkan objek penelitiannya, *pruposive* sampling adalah pengambilan sampling berdasarkan maksud tertentu. Seperti melakukan wawancara yang mendalam pada Ketua Kandidat Partai Aceh pasca menang pemilu legislatif di Gayo Lues. Peneliti mengambil sampel pada timses, KIP, masyarakat dan tokoh adat serta yang ikut bergabung dalam koalisi Partai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang dari tokoh masyarakat, 4 dari timses partai, dan 1 dari ketua Partai Aceh serta 1 anggota KIP, dan perangkat lain dari beberapa gampong atau sarak opat seperti *reje* (kepala gampong), *imem* (imam), dan *petue* (petua adat) . Atas dasar realita tersebut untuk memperoleh subjek yang sesuai dilakukan observasi.

1.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu tofik tertentu. Wawancara dalam penelitian yakni dengan jenis wawancara yang tidak terstruktur yang jenis wawancara hanya memuat garis besar

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

yang akan ditanyakan, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan antara peneliti dengan narasumber supaya tetap berada dalam situasi natural (*natural setting*) agar tidak terjadi bias.

Tentunya peneliti akan menentukan responden tertentu yang akan diwawancarai yaitu:

1. Ketua Partai Aceh di Gayo Lues (Kandidat).
2. Timses.
3. Masyarakat dan Pemuda kampung.
4. Pengurus kampung.

Sebelum memasuki lapangan untuk melakukan wawancara kepada subjek dan informan penelitian. Penelitian membuat pedoman wawancara yang sudah didiskusikan dengan pembimbing. Pedoman ini hanya sebagai panduan bukan ketetapan mutlak, sehingga tidak boleh menanyakan sesuatu yang dirasa tidak penting untuk ditanya, tetapi pedoman ini digunakan agar apa yang akan dicari dilapangan terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Proses wawancara dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wawancara mendalam melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur sehingga memudahkan penelitian dalam mengambil data dengan penelitian berjudul "*Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh, Study Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 Di Gayo Lues*".

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data perlu dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan konteksnya. Untuk itu, peneliti perlu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) yaitu:²⁷

a. Uji kredibilitas (*credibility*)

Berdasarkan ketentuan dalam penelitian kualitatif, apa yang diperoleh harus mendalam dan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan pembuktian agar data diperoleh dapat dipercaya, penelitian melakukan beberapa cara yaitu:

1) Memelihara keakraban peneliti dengan subjek dan informan dalam memperoleh data yang diperlukan. Pembinaan hubungan dengan subjek dilakukan dengan cara tinggal dilokasi penelitian, sementara itu informan di lokasi penelitian cukup melakukan pendekatan ulang karena sebelumnya sudah saling kenal.

2) Ketekunan pengamat, dilakukan peneliti dengan cara terus mengamati hal yang terjadi dilapangan yang dapat dijadikan data dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan, pengelompokan, analisis dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama dilapangan. Hal tersebut dilakukan setiap harinya, sehingga dapat diketahui data apa yang perlu ditambah dan data yang dicari lagi keesokan harinya.

3) Melakukan triangulasi, triangulasi yang dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap data yang diperoleh dari beberapa sumber dan mengecek derajat kepercayaan data yang dapat diperoleh dari beberapa informan. Misalnya setelah melakukan pengamatan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 337.

masyarakat dengan timses berkenaan dengan data yang ingin diperoleh tersebut. Jika informasi yang diperoleh sama dari setiap sumber maka data tersebut dapat diakui keakuratannya.²⁸

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: *data reduction, data display, conclusion drawing and verification.*²⁹

1) Miles dan Huberman menyatakan bahwa

“Data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting and tranforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions” yang berarti reduksi data merupakan bentuk-bentuk pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah. Reduksi data ini dilakukan selama peneliti berada dilapangan, karena kegiatan reduksi data dan analisis data tidak dapat dipisahkan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemerosesan data, yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan berkenaan fenomena tentang faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problem dalam kampanye Partai Aceh, semua diseleksi dan dikumpulkan dalam masing-masing katagori. Setelah itu jawaban yang diperoleh oleh hasil wawancara dengan setiap informan dikelompokkan,

²⁸ *Ibid.*, hal. 231.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 337.

sehingga terlihat perbedaan informasi yang diperoleh serta diketahui data mana yang belum lengkap dan segera dicari.

2) Data Display

Merupakan suatu penyajian yang berisikan informan yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sebagaimana Miles dan Huberman menyatakan “ *The second major of anaysis activity is data display. Genericall a display is an organized, compresedd assembly of information that permitis counclusion drawing and action*”. Data yang diproses pada kegiatan ini adalah informasi mengenai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problem dalam kampanye Partai Aceh yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada subjek dan informan.³⁰

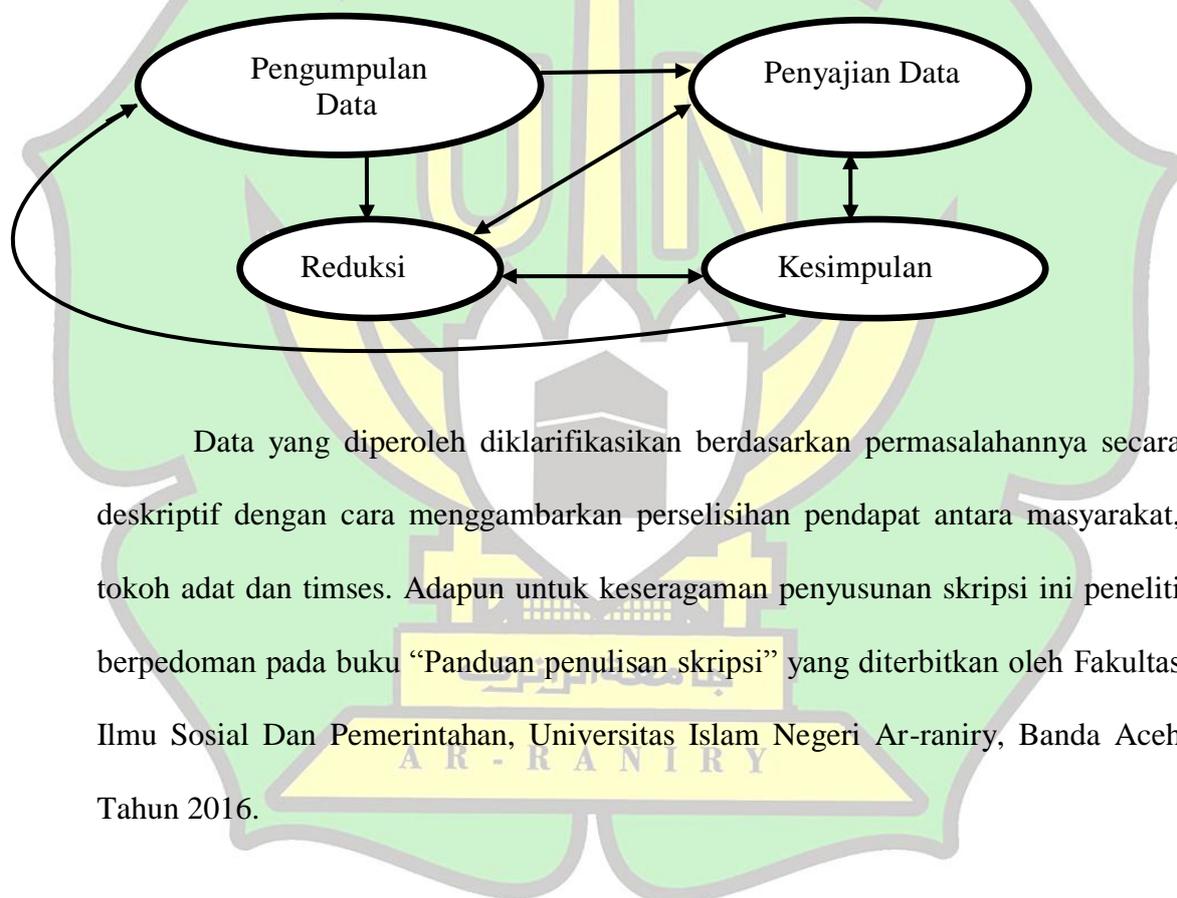
Proses penyajian data yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah, penyusunan data yang diperoleh membentuk satu jalinan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Sehingga dapat diketahui data mana yang belum lengkap dan dapat dilacak kembali kelapangan. Peneliti dalam hal ini berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat sedemikian teliti.

Sejak awal meneliti, peneliti berusaha untuk mencari makna dari setiap data yang diperoleh. Verifikasi data dilakukan dengan cara berpikir ulang selama melakukan penulisan merujuk catatan lapangan. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari setiap subjek dan informan penelitian, mengenai masalah penelitian yang sifatnya penting. Jika data yang diperoleh sudah sempurna dalam artian dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

³⁰ *Ibid.*, hal. 341.

Penarikan kesimpulan akhir/penelitian diperoleh dari hasil deskripsi berupa laporan ilmiah. Kesimpulan akhir diperoleh dengan cara hasil wawancara berkenaan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya problem dalam kampanye Partai Aceh pasca pemilu legislatif. Penelitian ini menggunakan analisis dan model Miles Huberman, sebagai ilustrasi untuk memperjelas prosedur dalam melaksanakan analisis data. Berikut gambar dari proses reduksi data *display* dan data verifikasi.³¹

Komponen analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman.



Data yang diperoleh diklarifikasikan berdasarkan permasalahannya secara deskriptif dengan cara menggambarkan perselisihan pendapat antara masyarakat, tokoh adat dan timses. Adapun untuk keseragaman penyusunan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku “Panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh Tahun 2016.

³¹ *Ibid.*, hal. 338.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia.

Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu penduduk Kabupaten Gayo Lues berasal dari berbagai etnik dan suku Gayo, Aceh, Melayu, Tionghoa, Alas, Minang, Batak Toba, Mandailing, Karo, Sunda, singkil Pakpak, Devayan dan Jawa. Juga daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali.

Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974). Namun karena daerah Gayo mengalami kesulitan, mereka pun membentuk kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002). Pusat pemerintahan dari kabupaten ini dikendalikan dari Desa Cinta Maju sedangkan pusat perekonomian tetap di ibu kota Blangkejeren

dengan pemerintahan baru yang dilantik dan ditetapkan sebagai bupati Gayo Lues H.Muhammad Amru.MSP dan wakilnya dijabat oleh H. Said Sani.S.Pd.³²

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29" BT dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur
Timur	Kabupaten Aceh Tamiang dan Sumatera Utara
Barat	Kabupaten Aceh Tenggara
Selatan	Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 2.5 Luas Wilayah

Kabupaten Gayo Lues mencakup 57 persen dari wilayah lama Aceh Tenggara, dan dibagi menjadi 9 kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

- Blang Kejeren
- Rikit Gaib
- Blang Pegayon
- Kuta Panjang
- Terangon
- Debus Gelang
- Pining
- Putri Betung
- Blang Jerango

2. Potensi Daerah dan Mata Pencapaian

Penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perkembangan dan kemajuan suatu wilayah, baik itu dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas penduduknya. Adapun jumlah penduduk 17 jiwa/km² dengan 95.370 jiwa dan Beberapa komoditas potensial yang dimiliki kabupaten ini adalah:

³² Bebjang., *Indeks Pembangunan Menengah Gayo Lues*, Mei 2014. Diakses pada Tanggal 22 September 2019. Disitus: <https://lintasgayo.co/2016/03/09/sejarah-perjalanan-lahirnya-kabupaten-gayo-lues>.

- Cabe merah besar di kecamatan Blang Pegayon dan Puteri Betung
- Serai Wangi, yang dikembangkan di sela-sela pepohonan pinus di hampir seluruh wilayah Gayo Lues
- Nilam, yang banyak ditanam di daerah Terangun
- Tembakau Virginia di Kecamatan Pantan Cuaca
- Kakao di kecamatan Puteri Betung
- Kopi Gayo di Kecamatan Pantan Cuaca
- Durian di Kecamatan Pining
- jagung di kecamatan blangkejeren

selain itu juga ada beberapa Pariwisata, Gayo Lues sebagai berikut:

- Pintu utama pendakian Gunung Leuser di Kedah, Penosan, Kecamatan Blang Jerango
- Pemandian air panas di Kecamatan Puteri Betung
- Air terjun Akang Siwah di Kecamatan Blang Pegayon
- Wisata Ekosistem Leuser di Kecamatan Puteri Betung
- Genting di Kecamatan Pining
- Air terjun Rerebe di Kecamatan Tripe Jaya
- Kampung Inggris di Agusen³³

3. Adat dan Istiadat

Masyarakat Gayo hidup dalam komunitas kecil yang disebut kampung. Setiap kampung dikepalai oleh seorang gecik. Kumpulan beberapa kampung disebut kemukiman, yang dipimpin oleh mukim. Sistem pemerintahan tradisional berupa

³³ Tanoga Sipane., *Kebiasaan urang Gayo*, Januari 2016. Diakses pada Tanggal September 2019 disitus: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kampung_di_Kabupaten_Gayo_Lues.

unsur kepemimpinan yang disebut sara opat, terdiri dari reje (raja), petue (petua), imem (imam), dan rayat (rakyat). Pada masa sekarang beberapa buah kemukiman merupakan bagian dari kecamatan, dengan unsur-unsur kepemimpinan terdiri atas: gecik, wakil gecik, imem, dan cerdas pandai yang mewakili rakyat.

Sebuah kampung biasanya dihuni oleh beberapa kelompok belah (klan). Anggota-anggota suatu belah merasa berasal dari satu nenek moyang, masih saling mengenal, dan mengembangkan hubungan tetap dalam berbagai upacara adat. Garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip patrilineal. Sistem perkawinan yang berlaku berdasarkan tradisi adalah eksogami belah, dengan adat menetap sesudah menikah yang patrilokal (juelen) atau matrilokal (angkap).

Kelompok kekerabatan terkecil disebut sara ine (keluarga inti). Kesatuan beberapa keluarga inti disebut sara dapur. Pada masa lalu beberapa sara dapur tinggal bersama dalam sebuah rumah panjang, sehingga disebut sara umah. Beberapa buah rumah panjang bergabung ke dalam satu belah (klan). Pada masa sekarang banyak keluarga inti yang mendiami rumah sendiri. Pada masa lalu orang Gayo terutama mengembangkan mata pencaharian bertani di sawah dan beternak, dengan adat istiadat mata pencaharian yang rumit.

Selain itu ada penduduk yang berkebun, menangkap ikan, dan meramu hasil hutan. Mereka juga mengembangkan kerajinan membuat keramik, menganyam, dan menenun. Kini mata pencaharian yang dominan adalah berkebun, terutama tanaman Kopi Gayo. Kerajinan membuat keramik dan anyaman pernah terancam punah, namun dengan dijadikannya daerah ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, kerajinan keramik mulai dikembangkan lagi. Kerajinan lain yang juga

banyak mendapat perhatian adalah kerajinan membuat sulaman kerawang dengan motif yang khas.³⁴

4. Seni Budaya

Tradisional orang Gayo merupakan suatu unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat Gayo adalah kesenian, yang hampir tidak pernah mengalami kemunduran bahkan cenderung berkembang. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal, antara lain tari Saman dan seni bertutur yang disebut Didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat.

Di samping itu ada pula bentuk kesenian seperti tari Bines, tari Guel, tari Munalu, Sebuku /Pepongoten (seni meratap dalam bentuk prosa), guru didong, dan melengkan (seni berpidato berdasarkan adat). Dalam seluruh segi kehidupan, orang Gayo memiliki dan membudayakan sejumlah nilai budaya sebagai acuan tingkah laku untuk mencapai ketertiban, disiplin, kesetiakawanan, gotong royong, dan rajin. Pengalaman nilai budaya ini dipacu oleh suatu nilai yang disebut bersikemelen, yaitu persaingan yang mewujudkan suatu nilai dasar mengenai harga diri (mukemel).

Nilai-nilai ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, kesenian, kekerabatan, dan pendidikan. Sumber dari nilai-nilai tersebut adalah agama Islam serta adat setempat yang dianut oleh seluruh masyarakat Gayo.³⁵

³⁴Iwan., *Situs-Situs Sejarah dan Wisata Gayo*, Maret 2016. Diakses pada Tanggal 22 September 2019 dari situs: https://id.lintasGayo.Indeks_Pembangunan_2016.

³⁵Udin Simah Ate., *Pemongoten dan Seni Gayo*, Maret 2011. Diakses pada Tanggal 22 September 2019. Disitus: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues.

B. Hasil Penelitian

Sebelum melanjutkan pembahasan hasil penelitian ilmiah ini, peneliti akan membahas tentang awal permulaan penelitian ilmiah. Pertama sekali peneliti kunjungi adalah kantor Kepengurusan Partai Aceh pada hari senin tanggal 23 September 2019. Terlebih dahulu peneliti menemui beberapa Timses Partai Aceh dalam rangka meminta izin penelitian ilmiah di kantor Partai Aceh.

Pada hari itu juga peneliti melakukan wawancara dengan Timses dan mempertanyakan langsung yang sudah disusun dalam instrumen pertanyaan. Data dari hasil penelitian ini akan dideskripsikan berdasarkan pertanyaan yaitu: (1) Mengetahui cara kampanye Partai Aceh pasca pemilihan legislatif 2019 di Gayo Lues? Dan (2) Mengetahui perspektif masyarakat terhadap etika politik kampanye Partai Aceh 2019 di Gayo Lues ?

1. Cara kampanye Partai Aceh Pasca Pemilihan Legislatif 2019 di Gayo Lues.

“Memang perpolitikan itu tidak lepas dari berbagai cara mendapatkan dukungan penuh di setiap kalangan masyarakat dan tentu proses strategi sudah diatur sedemikian rupa lewat kami sebagai timses kemenangan. Selaku timses kami melakukan agenda pertemuan rutin seminggu sekali dengan tokoh masyarakat yang di sebut Sara Opat (terdiri dari reje (raja), petue (petua), imem (imam), dan rayat (rakyat). Pertama kami lakukan adalah dengan mendekati tokoh tersebut, karena tidak mudah kita langsung terjun ke lapangan dengan turut mencari suara. Kampanye Sara Opat ini terbilang unik dan kreatif, selaku kami timses terlalu lelah menangani langsung dan kami fungsikan sara opat sebagai penyamain pesan maupun sosialisasi dalam meraup dukungan masyarakat. Serta Sara Opat ini sangat berfungsi sekali menjalin keakraban dengan para tokoh dan timses baik berupa ngopi bareng serta pertemuan singkat yang kami jelaskan kepada mereka. Setelah itu barulah mereka yang mengajak masyarakat memilih salah satu Partai Aceh yang ada di Gayo Lues. Kampanye sara opat itu cukup menjadi modal utama untuk mendapatkan dukungan”.³⁶

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ksm Pada Tanggal 23 September 2019.

Dapat disimpulkan bahwa timses sara opat mengambil peran penting dalam mensosialisasikan Partai Aceh dan menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dalam meraih dukungan maupun suara. Sehingga sara opat ini merupakan retorika kampanye yang dibuat oleh Partai Aceh sendiri, artinya sosialisasi dari mulut-kemulut dengan mengambil tokoh adat yang ada di setiap kampung sehingga proses kampanye terbilang kreatif.

“Salah satu yang kami lakukan adalah sebagai pemuda dan dipilih sebagai timses adalah sungguh membanggakan dan di percayai sebagai timses pemuda. Hal yang kami lakukan mendekati kepala keluarga yang minimal dalam satu keluarga itu ada banyak anak ataupun sanak famili. Sehingga proses penyampaian sebuah pesan dan sosialisasi kecil-kecilan membuahkan hasil yang baik, dengan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari satu keluarga tersebut. Justru kami meminta dukungan kepada mereka, tentu yang kami tawarkan selain sosialisasi adanya janji singkat tentang pekerjaan yang akan nantinya jika memilih, keluarga tersebut diberi jaminan pekerjaan yang bisa menghidupi mereka, semisal mudah kerja dikantor, dan pekerjaan lainnya seperti pekerja umum. Jika dalam sanak Famili ini ada anak yang kuliah akan diberikan pekerjaan yang layak dikantor”.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa timses dari pemuda kampung sangat dibutuhkan sekali dalam membangun retorika kampanye yang baik untuk mendapatkan dukungan maupun suara.

“Saya awalnya dipercayai sebagai timses untuk membantu mendapatkan dukungan maupun suara lewat saya sendiri, saya melakukan cuman memberitahu mahasiswa untuk memilih Partai ini. Pasti tentu mahasiswa sekarang sudah cerdas dalam hal memilih, mereka juga tidak mau kalau hanya sekedar memilih saja. Itu membuat saya tidak mudah mencari dukungan kepada mahasiswa, namun tidak membuat saya menjadi tidak bersemangat untuk mengejar dukungan tersebut, saya kasih tau atasan (Timses Besarnya) untuk apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka untuk memilih Partai ini. Dan justru mereka memberikan ongkos pulang ke Gayo Lues untuk memilih Partai tersebut, serta ada beberapa retorika yang mereka sampaikan sehingga mahasiswa mau menerima ajakan dan tawaran timses Salah satunya adalah pekerjaan untuk sarjana nanti”.³⁸

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Sryd Pada Tanggal 24 September 2019.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Mla Pada Tanggal 24 September 2019.

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dari sanak famili Partai Aceh turut membantu mengambil peran penting dalam mendapatkan dukungan, dengan mengajak teman mahasiswanya ikut memberi suara kepada Partai Aceh.

“Saya seorang pekerja disalah satu instansi dan saya tidak menyebutkan instansinya karena ini masalah sensitif dan saya ikut terjun menyukseskan pemilu legislatif ini adalah karena faktor pekerjaan. Dimana saya harus memilih si A untuk tetap bertahan dan akan tetap bekerja di kantor tersebut. Sehingga dari Partai Aceh turut meminta bantu kepada saya dan ini membuat pekerja yang lain sama pemikirannya dengan saya. Saya justru tidak mau ambil pusing mengenai pemilu, yang penting kepentingan pribadi saya tenang, karena pekerjaan saya juga bukan untuk membuat saya kaya, hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari”.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa timses dari karyawan pekerja turut mengambil bagian penting dalam menyukseskan pemilu yang berlangsung kemaren.

2. Perspektif Masyarakat Terhadap etika politik kampanye Partai Aceh 2019 di Gayo Lues.

“Beliau menyanangkan sifat janji yang di tawarkan lewat retorika kampanye yang sedemikian bagus dibuat, pada masa pemerintahan Zaini Abdullah banyak ditawarkan janji dengan bahasa yang santun membuat masyarakat ikut tercengang dengan janji yang ditawarkan. Lalu dengan pasca pemilu kemaren janji yang diberikan tidak pernah tersampaikan. Salah satunya janji dana perkebunan minyak sere di desa Rikit Gaib tidak tersalurkan, padahal sudah bekerjasama antara penanam minyak sere dengan orang partai, bahkan sudah disosialisasikan empat kali untuk setiap minggunya akan ada binih minyak sere dan ditanam dalam kurung waktu 3 bulan, serta hasilnya dinikmati masyarakat Desa Rikit Gaib dan sebagian hasil dijadikan modal pembangunan Desa setempat. maka masyarakat kecewa apalagi saya sebagai anggota sangat menyanangkan hal ini. Serta sampai saat ini Partai Aceh dibanding dengan Partai lain tampak mulai turun akibat janji dan kurangnya sosialisasi Partai kepada elemen rakyat serta yang duduk di DPRA hari ini cuman ada beberapa orang dan tidak banyak”.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa salah satu timses pernah bergabung dalam timses Partai Aceh, namun karena ada permasalahan terhadap janji yang ditawarkan tidak

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Usn Pada Tanggal 25 September 2019.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dsd Pada Tanggal 26 September 2019.

terpenuhi, maka anggota timses ini mengundurkan diri dan memilih bergabung menjadi timses Partai PKB.

“Menurut saya ada harapan yang diberikan Partai Aceh kepada Gayo Lues, namun mungkin belum tersalurkan. Karena proses kampanye itu terbilang rumit walaupun sudah selesai dalam pemilu namun ada saja proses atau retorika yang belum tersampaikan. Kedepan semoga dengan adanya retorika kampanye bisa mengedepankan hak rakyat bukan semata kepentingan apalagi kelompok. Karena kampanye dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh KIP masing-masing daerah, apabila melanggar pasti ada konsekuensinya. Serta akan ada sanksi yang diberikan kepada partai tersebut melalui pemilu yang berlangsung kemaren. Kalau saya menilai Partai Aceh sudah mampu menjadi sahabat rakyat artinya orang-orang sudah mengenal Partai Aceh sebagai partai lokal yang tujuannya lebih mementingkan hak rakyat Aceh”.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan tokoh adat, mengatakan bahwa Partai Aceh sendiri sudah bersahabat baik dengan masyarakat dan masyarakatpun sudah mengenal Partai Aceh dan tentu retorika yang dibangun sudah sesuai dengan etika politik yang ada.

“Selama pasca pemilu kemaren tidak ada satupun hambatan untuk meraih kemenangan. Kampanye berjalan sesuai aturan yang berlaku pada konteks kampanye pemilu legislatif kemaren. Dan perkembangan Partaipun lumayan berkembang karena ada beberapa legislatif yang duduk di DPRA perwakilan dapil 8 (Aceh tenggara dan Gayo Lues) Bapak Yadi, Bapak Jafar (anggota DPRK), Kalidin Dapil 2 DPRK Kecamatan Terangun, Said Ahmad (Anggota DPRK) dan Bupati Gayo Lues Bapak M.Amru juga dari Partai Aceh, serta 4.200 Kader yang ikut memperjuangkan Partai Aceh tetap hidup di Gayo Lues. Selama proses kampanye pemilu legislatif kemaren, kami tidak pernah menerima adanya sanksi maupun pelanggaran yang dibuat oleh Partai kami sendiri, serta spanduk yang di pasang sesuai aturan kampanye dan apalagi soal mendapatkan dukungan dari masyarakat, kami sudah mengambil izin dari kepolsian untuk turut mengambil suara rakyat dengan mensosialisasikan Partai Aceh.

Jika mengingat masa lalu memang Partai Aceh selaku partai lokal banyak hambatan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, apalagi Gerakan Aceh Merdeka berawal dari partai ini, selain intimidasi, kekerasan pada masyarakat cukup sangat parah pada tahun sebelumnya, bahkan mereka mewajibkan untuk memilih Partai Aceh sebagai partai lokal yang unggul, justru karena itulah partai ini dulu mampu menduduki kursi parlemen terbanyak. Tapi jika dibandingkan saat ini Partai Aceh cukup menjadikan partai yang mensejahterakan masyarakat lewat perbandingan partai lain, karena partai ini memiliki tujuan dan visi misi yang paling inti yaitu mempertahankan Mou Helsinki. Serta kami juga tidak terlalu mengambil

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Symsd Pada Tanggal 26 September 2019.

inisiatif pengembangan partai lewat website dan media, artinya cukup tertutup untuk hal keterbukaan Partai Aceh itu sendiri. Jika memang ada awak media lain baik wartawan yang ingin mewawancarai di perbolehkan lewat langsung empat mata dan boleh langsung merekam wawancara yang berlangsung. Ketika kampanye kemaren langsung ada gerakan retorika yang kami namakan Sara Opat yaitu orang-orang penting yang ada disetiap kampung juga langsung menemui masyarakat lewat sosialisasi kampanye di beberapa kampung. Kalau untuk mempertanyakan hubungan retorika kampanye dan etika politik kampanye kemaren, menurut Bapak sesuai aturan dan tidak pernah menciderai proses kampanye yang berlangsung apalagi mencoreng nama baik Partai. Karena memang terbukti belum ada pelanggaran sanksi yang diberikan oleh KIP itu sendiri”.⁴²

Dapat disimpulkan dari paparan orang partai selaku Bendahara Umum Partai Aceh di Gayo Lues, bahwa kampanye sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di seluruh Indonesia, tidak adanya pelanggaran maupun pencopotan spanduk pada pemilu legislatif kemaren walaupun hanya sedikit yang mampu diduduki oleh kandidat Partai Aceh di parlemen Provinsi dan Kabupaten namun murni hasilnya dan tidak dibuat-buat.

“Partai Aceh sejauh ini bagi saya baik. Tidak pernah melanggar aturan. Serta saya menerima uang sogokpun tidak pernah. Apalagi menerima ancaman/intimidasi sejauh ini belum pernah, namun berbalik kearah masa lalu, buat saya duduk didepan rumah sudah ada suara tembakan dari Gerakan Partai Aceh. Dentuman setiap dentuman membuat kami panik apalagi kami harus rela berminggu-minggu berada dirumah karena kampanye yang cukup menakutkan bagi masyarakat. Tapi untuk kampanye kemaren Alhamdulillah belum ada seperti yang saya katakan sebelumnya”.⁴³

Dapat disimpulkan dari wawancara masyarakat belum ada pelanggaran terhadap Partai Aceh dan sesuai dengan etika politik yang ada.

Kalau bagi saya aman-aman saja selama proses kampanye berlangsung, tidak ada mengintimidasi. Cukup bagi saya untuk tidak menakut-nakuti. Apalagi kami masyarakat kecil yang tidak tau menahu tentang politik. Untuk saat ini kampanye berjalan efektif.⁴⁴

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail Marzuki Pada Tanggal 27 September 2019.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Isnt Pada Tanggal 28 September 2019.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Drm Pada Tanggal 28 September 2019.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat tentang Partai Aceh sejauh ini baik dan tanggapan masyarakat yang satu ini sama sekali tidak menahu tentang politik namun dia menilai berjalan efektif kampanye yang berlangsung kemaren.

“Buat apa kekerasan untuk dizaman milineal ini, sekarang kampanye tidak bisa dipertainkan lagi. Masyarakat sekarang sudah cerdas, mampu memilih pilihan yang menurut dia sesuai dengan pilihannya. Kalau saya menanggapi soal Partai Aceh, jelas ini produk lokal partai yang di buat oleh Aceh sehingga siapapun yang ingin berkembang dalam dunia politik bisa bergabung sendiri dan tentu kita patut berbangga hati untuk punya partai lokal yang unggul di nasional dan diakui Indonesia”.⁴⁵

Dapat disimpulkan hasil wawancara dengan salah satu warga mengatakan etika politik Partai Aceh sangat membanggakan, karena dia menilai partai ini tidak membatasi siapapun yang ikut bergabung kedalam Partai Aceh.

“Saya asal memilih saja, karena tidak terlalu paham tentang kampanye, politik dan sejenis kampanye. Yang penting kami memilih ketika pemilu berlangsung seperti kemaren. Selain itu tidak ada harapan yang kami inginkan karena memang kurang paham tentang kampanye”.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini mengatakan sama sekali tidak paham tentang kampanye sehingga pemahamannya masyarakat ini tidak sama sekali tau tentang kampanye mereka memilih karena melihat masyarakat lain memilih artinya ikut-ikutan.

“Bagi saya pemilu kemaren membuat suatu pembaruan baru dibanding pemilu sebelumnya, mulai dari ketidakadaan intimidasi dan masyarakatnyapun mulai cerdas dalam menanggapi soal pilihan, namun yang saya lihat Partai Aceh sendiri begitu bagus dari partai lain, belum ada di salah satu media bahwa Partai Aceh menciderai proses kampanye apalagi soal pasang spanduk sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum ada pencopotan spanduk dan dikabarkan di awak media partai telah melanggar aturan kampanye, tentu belum ada di mediakan di Gayo Lues. namun memang jika dikaitkan dengan partai lain justru banyak probelematika muncul dan hadir, mulai dari pelanggaran pemasangan spanduk ditempat yang dilarang, kemudian kampanye di luar masanya kampanye”.⁴⁷

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak KmrD Pada Tanggal 28 September 2019.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mrym Pada Tanggal 28 September 2019.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ksm Pada Tanggal 28 September 2019.

Dapat disimpulkan bahwa dia mengatakan tidak ada pelanggaran dan dia membandingkan partai ini jauh lebih bagus dari partai lainnya. Sehingga dia menilai etika politik Partai Aceh sudah memenuhi retorika kampanye yang ada.

“Ada dua sisi yang saya harus lihat, pertama cara mereka berkampanye kemudian etika politiknya, jika kedua ada dalam partai manapun tentu ini akan menjadi ajang perpolitikan demokrasi yang bagus. Memang saya melihat masih ada nampak sedikit kecurangan pada masa kampanye walaupun hanya sedikit tidak dengan kampanye sebelumnya. Kalau poin plus yang bisa kita ambil pada masa kampanye kemaren cukup baik dan tidak ada proses yang menuai permasalahan”.⁴⁸

Dapat disimpulkan kampanye kemaren berjalan cukup baik dibandingkan dengan kampanye sebelumnya.

Saya melihat perpolitikan di Gayo Lues sudah berangsur membaik, kalau dulu masa kampanye sangat mengkhawatirkan, pertama menakut-nakuti kemudian menekan masyarakat untuk memilih lalu dimana-mana ada suara tembakan dan hal lain lagi. Banyangkan hari ini jika kampanye tetap ricuh, maka demokrasi politik hancur, tapi untuk di daerah kita sendiri cukup stabil kampanye masih mengikuti etika politik yang baik.⁴⁹

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut masyarakat menilai belum ada kampanye yang ricuh di Gayo Lues serta kampanyepun cukup stabil dalam proses retorika kampanye dan etika politik Partai Aceh sudah baik.

“Sebenarnya saya malas menjawab mengenai kampanye apalagi soal etika politik. Jika dilihat masih ada yang kurang etika dari seorang calon kandidat, kampanye memang kalau tidak melakukan cara yang sedikit licik itu tidak akan berjalan, intinya harus pintar-pintar dalam penyampain bahasa untuk berpapasan kepada khalayak umum. Namun kuncinya sekarang sudah stabil antara kampanye dengan etika politik sudah mulai diperankan dan di fungsikan untuk Partai Aceh di Gayo Lues termasuk untuk Partai Aceh sendiri”.⁵⁰

Dapat disimpulkan dari penjelasan wawancara salah satu warga mengatakan bahwa peran calon kandidat maupun partai sudah mulai difungsikan oleh Partai Aceh sehingga dinilai etika politik yang ada berjalan stabil.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Brhn Pada Tanggal 29 September 2019.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yusuf Pada Tanggal 29 September 2019.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yahya Pada Tanggal 29 September 2019.

“Saya termasuk pemilih pasif artinya tidak terlalu menahu tentang kampanye, yang saya tau hanya perkumpulan bapak-bapak dengan memakai baju merah, berkeliling kesetiap kampung untuk bercerita dan berbaur dengan masyarakatnya. Ketika anda menanyakan dua hal retorika kampanye dan etika politik dari salah satu partai lokal yaitu Partai Aceh saya justru tidak begitu tau, artinya saya memilih apa yang masyarakat pilih atau ibu-ibu dikampung memilih apa. Baru kemudian saya ikut juga memilih seperti mereka, bukan sama sekali karena ada hal lain, karena memang justru saya sendiri tidak paham, dan saya melihat masyarakat sibuk dengan kampanye dan saya justru tidak ambil pusing dari bagian kampanye”.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan salah satu warga menunjukkan sikap tidak tahu menahu tentang kampanye dan politik dan hanya mengambil peran sebagai pemilih yang hanya ikut-ikutan dengan masyarakat lain yang memilih.

C. Pembahasan

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan baik usaha kampanye dilakukan perorangan atau kelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil dan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan dan pembelokan pencapaian.

kampanye memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan apa yang diharapkan oleh partai, kandidat dan orang yang mencalonkan diri di pemerintahan dengan cara mempengaruhi melalui bahasa yang menarik simpati

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah Pada Tanggal 30 September 2019.

masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Bahasa dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih.⁵²

Pesan bahasa sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-Poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.

Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat penjelasan rinci programnya.⁵³

Berdasarkan teori di atas dapat di simpulkan bahwa kampanye itu penting untuk Partai, apalagi ketika memperoleh dukungan, namun berbagai cara telah dilakukan untuk mendapatkan suara tentu harus sesuai tuntutan etika perpolitikan yang baik, serta jelas keberadaan partai untuk mensejahterakan masyarakat, sebagai penampung aspirasi masyarakat dan tidak menciderai proses kampanye yang berlangsung kemarin. Itu merupakan sebuah etika politik yang cukup memenuhi syarat bahwa Partai Aceh selama kampanye kemaren belum sama sekali melakukan pelanggaran.

⁵² Latief, T.A., "*Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi Dan Informasi*", (Medan: Pt Firma 2011), hlm.122.

⁵³ Liliweri, Alo, "*Komunikasi Serba Ada Serba Makna*", (Jakarta:PT Laskar Aksara 2014), hlm. 289.

Kemudian dari hasil penelitian dan teori di atas penulis dapat menganalisis mengenai bagaimana mengetahui cara kampanye Partai Aceh pasca pemilihan legislatif 2019 di Gayo Lues dan mengetahui perspektif masyarakat terhadap etika politik kampanye Partai Aceh 2019 di Gayo Lues. Tentu yang penulis teliti selama proses kampanye berlangsung di Gayo Lues berjalan sesuai aturan yang berlaku di kampanye tersebut.

Sejauh ini poin utama belum ada pelanggaran maupun sanksi yang diberikan oleh KIP itu sendiri. Bahkan Partai Aceh sendiri melihat kepentingan masyarakat dan mempertahankan MoU Helsinki untuk sebagai generasi partai, bahwa Aceh punya kekhususan partai lokal yang baik dan dapat menjadikan panutan untuk partai lain. Selain itu juga Partai Aceh di Gayo Lues mampu membangun 4.200 kader di setiap kampung, baik milenial muda hingga dewasa, supaya Partai ini tidak hilang dimata Masyarakat, apalagi Bupati Gayo Lues sendiri berasal dari didikan Partai Aceh.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden mengenai faktor pendukung beserta penghambat selama proses kampanye tertera jelas, masyarakat menilai partai ini belum pernah melakukan aksi intimidasi untuk mendapatkan suara. Karena untuk meperoleh suara saja tidak sesulit zaman dulu. Sekarang masyarakat ada yang paham terhadap politik dan ada yang belum paham terhadap politik, ini yang disayangkan sekali ketika peneliti menanyakan tentang keberadaan Partai Aceh masyarakat yang tidak paham politik datang dari orang-orang yang rumahnya jauh dari pusat kota dan rata-rata yang mendominasi ketidakpahaman politik berumur dewasa dan remaja.

Namun ada masyarakat sendiri sudah tidak terlalu lazim mengenai politik, mereka tidak mau meributkan soal pilihan dikarenakan pekerjaan maupun tuntunan

aspirasi yang mengharuskan untuk memilih Partai Aceh dan masyarakat juga banyak dari kalangan saudara. Selain masyarakat ada timses pendukung melakukan kampanye yang salah menjajikan kepada masyarakat berupa bahasa yang cukup membuat masyarakat percaya, yaitu seperti mmberikan dana minyak sere dan program dana lain, ketika masyarakat menuntut itu sama sekali tidak berjalan dan tidak sampai ketangan masyarakat.

Bahkan ada timses besar keluar dan tidak bergabung dengan partai lalu pindah kepartai lain, karena kejanggalan untuk anggota saja tidak terlalu banyak memberikan keuntungan. Timses justru mengundurkan diri tidak ikut lagi dalam memperjuangkan Partai Aceh. Timses ini merasa kecewa atas sikap Partai Aceh. Namun sejauh ini Partai Aceh belum terlihat mencoreng nama baik, walaupun ada beberapa orang dan timses yang tidak menyukainya.

Berdasarkan dari hasil pembahasan menyatakan bahwa kampanye dalam perspektif etika politik sesuai aturan dan saling berhubungan satu arah sehingga proses kampanye tidak menciderai politik kampanye yang berlangsung kemaren, namun ada catatan kecil untuk membangun kampanye harus sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta tidak melakukan kampanye yang sifatnya buruk walaupun memang politik menghalakan segala cara untuk apapun dalam memperoleh dukungan. Namun Partai Aceh sendiri ingin memperjuangkan hak asasi masyarakat Aceh sendiri serta mempunyai produk partai lokal yang bagus dan milineal muda maupun partai lain dapat mencontoh Partai Aceh.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab lima ini akan diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Retorika sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu legislatif, dimana semua proses kampanye dilakukan berbagai macam cara, melalui tim besar dan timses pemenang serta yang terlibat dalam proses kemenangan kampanye yaitu tokoh adat dan masyarakat. Kampanye terbilang rumit, jika kampanye yang dilakukan tidak sesuai dengan norma etika politik yang ada maka proses itu bisa gagal dalam sekejap.

Kampanye juga berpengaruh pada ucapan seorang calon kandidat seperti dia berasal dari didikan Partai Aceh, serta ucapan dan seni yang sangat mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan maupun suara terlihat dari cara para calon kandidatnya. Sehingga proses penyampaian visi/misi partai bisa disosialisasikan kepada masyarakat dan pendengarnya ikut terbawa suasana bahwa kampanye dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan etika politik.

Etika politik Partai Aceh dinilai tidak menciderai perpolitikan pada masa kampanye kemaren, karena bisa dilihat dari tanggapan masyarakat beserta orang partai. Mereka sama sekali tidak menciptakan kampanye yang buruk. Selain itu juga 4.200 kader Partai Aceh mampu membangun kerjasama yang baik dengan kader milineal muda sampai dewasa. Itulah yang membuat partai ini dikenal oleh masyarakat Gayo Lues, bahkan bupati juga datang dari kalangan Partai Aceh.

Meskipun ada sedikit pencideraan Partai Aceh terhadap kampanye dalam etika perpolitikan yang dilanggar oleh partai yaitu tentang menjanjikan sebuah dana untuk beberapa orang termasuk dana perkebunan yang belum sampai ketangan masyarakat. Namun sejauh ini dari hasil penelitian dan serta tercatat Partai Aceh sudah memiliki kelayakan telah mengikuti kampanye sesuai dengan etika politik.

B. Rekomendasi

Adapun saran-saran yang ingin diajukan oleh penulis adalah ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada masyarakat akan terus menjadi orang yang dapat memilih calon dan partai untuk dapat mengubah daerah dan kampung artinya pemilih cerdas. Agar dapat lebih memperhatikan mengontrol/mengawasi kampanye yang curang di setiap kampungnya.
2. Website atau sosial media Partai Aceh diharapkan dapat menjadi media komunikasi untuk memberikan informasi yang update kepada khalayak umum serta tidak tertutup.
3. Kepada tokoh adat juga sebaiknya dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam memilih partai maupun calon kandidat yang tidak bermain curang ataupun ucapan janji-janji kepada masyarakat dan masyarakat tidak berharap serta tidak ada kekecewaan.
4. Serta Partai Aceh dapat mengemban amanah sesuai janji Mou Helsinki yaitu berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh.
5. Kepada para peneliti selanjutnya, maka dapat melanjutkan penelitian ini, guna untuk menemukan perbedaan apa yang peneliti tulis dengan peneliti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zakar, *Komunikasi Efektif Politik*, (Bandung: PT Cempaka, 2012).

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014).

Bodgan dan Taylor Dalam Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Bebujang., *Indeks Pembangunan Menengah Gayo Lues*, Mei 2014. Diakses pada Tanggal 22 September 2019. Disitus: <https://lintasgayo.co/2016/03/09/sejarah-perjalanan-lahirnya-kabupaten-gayo-lues>.

Eko Handoyo, Martien Herna Susanti, dan Moh. Aris Munandar., *“Etika Politik”*, (Semarang: Penerbit Widya Karya Press 2008).

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

Hafied Cangara, *“Komunikasi Politik, Konsep, Teori, Dan Strategi”*, (Bandung: PT. Raja Grafindo 2009).

Hasil Wawancara Dengan Bapak Dsd Pada Tanggal 26 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Tokoh Adat Bapak Symsd Pada Tanggal 26 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail Marzuki Pada Tanggal 27 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Isnt Pada Tanggal 28 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Drm Pada Tanggal 28 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Kmrdr Pada Tanggal 28 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Mrym Pada Tanggal 28 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Ksm Pada Tanggal 28 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Brhn Pada Tanggal 29 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Yusuf Pada Tanggal 29 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Yahya Pada Tanggal 29 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah Pada Tanggal 30 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ksm Pada Tanggal 23 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Sryd Pada Tanggal 24 September 2019.

Hasil Wawancara Dengan Mla Pada Tanggal 24 September 2019.

Hasi Wawancara Dengan Bapak Usn Pada Tanggal 25 September 2019.

Iwas Ismi Febriyanto dkk, *Partai Politik Lokal Aceh Dalam Perspektif Demokrasi Radikal*, Tesis Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya, Brawijaya 2017.

Iwan., *Situs-Situs Sejarah dan Wisata Gayo*, Maret 2016. Diakses pada Tanggal 22 September 2019 dari situs: https://id.lintasGayo.Indeks_Pembangunan_2016.

Ibid., hlm. 153.

Ibid., hlm. 154.

Ibid., hlm. 3.

Ibid., hal. 231.

Ibid., hlm. 337.

Ibid., hlm. 337.

Ibid., hal. 341.

Ibid., hal. 338.

Jalaluddin Rakhmat, *Retorika Modern : Pendekatan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

Jambo Muhajir, Diakses pada tanggal 12 Juni 2019, Pada situs: (<https://m.tribunews.amp/pilpers-2009\2018\09\03\dua-elit-partai-aceh-beda-pilihan-muzakir-manaf>).

James M. Henslin, “*Sosiologi dengan pendekatan membumi*”, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Junanda Manurung, *Perspektif Masyarakat Terhadap Pilkada dalam Studi Kasus Masyarakat di Kelurahan Padangsidempuan 2013-2018*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan 2018.

Latief, T.A., *“Dasar-Dasar Rhetorica Komunikasi Dan Informasi”*, (Medan: Pt Firma 2011).

Liliweri, Alo, *“Komunikasi Serba Ada Serba Makna”*, (Jakarta:PT Laskar Aksara 2014).

M. Sidi Ritaudin., *“Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis Dan Rasional Politik Bangsa”*. *Jurnal Tapis* Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014.

Muhammad Jafar Aw, *“Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”*, Tesis Fakultas Ilmu Politik Pasca Sarjana, Universitas Penegoro, Semarang, 2009.

Norris, Rises, Paisley dan Cangara, *“Sosiologi Konsep Politik”*, (Bandung:Rajawali Pers 2012).

Pippa Noris, *“Sosiologi Filsuf”*, (Jakarta:PT Erlangga 2009).

Rizwan Haji Ali, *“Partai Lokal Untuk Rakyat”*, di Akses Pada Tanggal 20 Desember 2019 disitus, <http://putraaceh.multiply.com/journal/item/675>. 2014.

Ronald dkk, *“Sosiologi Konsep Politik”*, (Bandung: Rajawali pers 2009).

Saiful Amri, *Perspektif Opini Publik Terhadap Partai Aceh Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 di Aceh Barat*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh 2013.

Sartori, *“Party and Party System: A Framework For Analysis”*, (Medan:PT Firma 2009).

Syamsuddin, *“Dinamika Partai Politik Lokal Studi Partai Aceh Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Aceh Timur”* Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Saifuddin Bantasyam, *“Parlok Vs Parnas dalam pemilu”*, Edisi Serambi Indonesia 2009.

Teuku Kamal Farsya, di Akses Pada Tanggal 19 Desember 2019, Pada Situs <http://www.Serambinews.edisi28/4/2006>.

Tanoga Sipane., *Kebiasaan urang Gayo*, Januari 2016. Diakses pada Tanggal September 2019 disitus: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kampung_di_Gayo_Lues.

Udin Simah Ate., *Pemongoten dan Seni Gayo*, Maret 2011. Diakses pada Tanggal 22 September 2019. Disitus: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 229/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2019
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Ar, M.Ed | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Ade Irma, B.H.Sc., M.A | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Rahmita |
| NIM | : 150801012 |
| Prodi | : Ilmu Politik |
| Judul | : Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh (Studi Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legislatif 2019 di Gayo Lues) |
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2019



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1533/Un.08/FISIP /PP.00.9/07/2019

18 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kantor Kepengawasan Partai Aceh

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Rahmita
NIM : 150801012
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Retorika Kampanye Dalam Presfektif Etika Politik (Studi Kasus
Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu Legeslatif 2019).

Lokasi Penelitian : Lembaga Kepengawasan Partai Aceh di Gayo Lues.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI ACEH
KABUPATEN GAYO LUES

Jln : Blangkejeren – Kutacane, No. 187 Penampaan Uken Blangkejeren Kab. Gayo Lues , Kode pos 24653, Telp./Hp. 0823 7010 1010

Nomor : 015/DPW-PA/GL/IX/2019 Blangkejeren, 23 September 2019
Lampiran : -
Prihal : Surat Balasan

Kepada Yth :

- Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR – RANIRY Banda Aceh
- Bapak Dosen Pembimbing

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,-

Berdasarkan Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : B.1533/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019, Tanggal 23 September 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian Terhadap Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues, maka kami dari dari Pengurus Dewan Pimpinan Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues telah memberikan Keterangan yang diperlukan mengenai Retorika pada masa Kampanye Pemilu Legeslatif tahun 2019, Khususnya pada Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues sebagai bahan Penelitian Kepada :

Nama : RAHMITA
NIM : 150801012
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR- RANIRY Banda Aceh

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

AR - RANIRY
Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues



ISMAH MARZUKI, ST
Ket. Umum

A. Wawancara Ketua Partai Aceh Di Gayo Lues di wakikan ke Bendahara Umum Partai Aceh.

1. Sejauh ini cara berkampanye Partai Aceh seperti apa dan strategi apa yang dibuat oleh Partai Aceh?
2. Bagaimana pandangan bapak dalam melihat Partai Aceh dari segi Etika politik ketika berkampanye?
3. Menurut anda bagaimana perkembangan Partai Aceh di Gayo Lues dalam pasca pemilu kemaren?
4. Sejauh ini apakah partai pernah melakukan black campaign semenjak kemenangan anda di pemilu bulan Maret 2019 ?

B. Timses

1. Siapa saja yang terlibat dalam kampanye untuk meraih kemenangan Partai Aceh di Gayo Lues ?
2. Selain Timses Pengurus sara opat ada juga timses dari kalangan pemuda kampung yang berperan dalam mencari dukungan?
3. Selain dari kalangan pemuda, timses ini dari kalangan mahasiswa yang mengatakan bahwa?
4. Selain pengurus kampung, pemuda, mahasiswa ternyata ada timses dari salah satu pekerja di instansi berperan dalam mencari suara maupun dukungan?
5. Timses bergabung pada saat pemilu sebelumnya namun pada pasca pemilu kemaren dia mengeluarkan diri dari timses Parta Aceh. Dia mengatakan?

C. Tanggapan Masyarakat dan Respon Masyarakat.

1. Tanggapan bapak mengenai Partai Aceh pasca pemilu kemaren dan jika dikaitkan dengan etika politik apakah sudah sejalan?

2. Pernahkah anda menerima sogokan serta bagaimana pendapat anda mengenai Partai Aceh, sejauh ini baik atau buruk?
3. Apa tanggapan ibu mengenai Partai Aceh masa kampanye kemarin?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai Partai Aceh dan jika dikaitkan dengan etika politik sudah sesuai atau sejalan dengan proses kampanye yang ada?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai pemilu kemaren terkhusus Partai Aceh?
6. Tanggapan anda pemilu kemaren mengenai Partai Aceh?
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai kampanye kemarin dan kaitainya sama etika politik?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai kampanye kemarin?
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai kampanye kemarin?
10. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemilu kemaren terhadap Partai Aceh serta keterkaitan etika politiknya?









WUJUD







WUJUD





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Rahmita
2. Tempat, Tanggal Lahir : Blangkejeren, 11 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat sekarang : Jln.Dharma. Kp Laksana. Kecamatan Kuta Alam
7. Asal : Gayo Lues
 - a. Kecamatan : Blangkejeren
 - b. Provinsi : Aceh
8. No. Telpn : 0822 7604 6524
9. Email : rahmita.mita27@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 6 Blangkejeren
- SMP Negeri 1 Blangkejeren
- SMA Negeri 1 Blangkejeren
- S1 Ilmu Politik Uin Ar Raniry Banda Aceh

ORANG TUA/WALI

1. Nama Ayah : Almarhum. Ismail
2. Nama Ibu : A R: Nursinah N I R Y
3. Alamat Orang Tua : Dusun Imem, Kp Kutelintang, Blangkejeren

Banda Aceh, 2 Januari 2019

Rahmita